



**PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG DEMOKRASI INDONESIA
TAHUN 1926-1962**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Nurul Hidayat
NIM 110210302012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu Yuwairiyah dan Ayah Satrawi yang sangat saya cintai dan kasihi yang telah membesarkan, mendo'akan serta memberi kasih sayang kepada penulis selama ini;
2. Kakakku Rusminingsih dan Adik-adikku Putri Sulastri dan Saiful Bahri yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Alm. Sutan Sjahrir serta bapak-bapak bangsa Indonesia yang telah meluangkan segenap pemikiran dan waktu yang dimiliki semasa hidupnya untuk kemerdekaan dan kedaulatan rakyat;
4. Bapak/Ibu Guru sejak SD sampai SMA dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membekali Ilmu Pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
5. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTO

Kita harus pula menyadarkan rakyat kita, bahwa rasa kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan sosial dapat diwujudkan dengan sempurna jika masyarakat kita didasarkan pada kemakmuran bersama serta merata

(Sutan Sjahrir)*



*) Sjahrir, S. 1982. Sosialisme, Indonesia, Pembangunan. Jakarta: LEPPENAS

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayat

Nim : 110210302012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi Indonesia tahun 1926-1962” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2016

Yang menyatakan,

Nurul Hidayat

NIM. 110210302012

SKRIPSI

**PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG DEMOKRASI INDONESIA
TAHUN 1926-1962**

Oleh

**Nurul Hidayat
NIM 110210302012**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sumarjono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sumardi, M.Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi Indonesia Tahun 1926-1962” telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Jum’at, 22 April 2016

tempat : Gedung I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP. 195808231987021001

Dr. Sumardi, M.Hum
NIP. 196005181989021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Marjono, M.Hum
NIP. 196004221988021001

Drs. Sumarno, M.Pd
NIP. 195221041984031002

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP. 195405011983031005

RINGKASAN

PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 1926-1962; Nurul Hidayat, 110210302012; 2016; xiii + 122 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Latar belakang masalah munculnya pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya, politik dan pendidikan. Demokrasi yang diharapkan Sutan Sjahrir adalah demokrasi yang mencari selamatnya bangsa Indonesia dan berusaha untuk memperoleh kedaulatan penuh. Demokrasi yang berlandaskan sosialisme kerakyatan dan di perjuangkan dalam politik, ekonomi dan sosial. Sutan Sjahrir berjuang untuk merubah tradisi lama dan memperjuangkan kedaulatan rakyat. Sutan Sjahrir mengembangkan sosialisme demokratis yang evolusioner menjadi sosialisme kerakyatan yang revolusioner untuk mencapai masyarakat yang demokratis. Pemikiran Sutan Sjahrir diperjuangkan dalam bidang politik pada saat menjadi Perdana Menteri Indonesia. Sutan Sjahrir banyak mendapat kritik dari lawan politiknya dalam memperjuangkan demokrasi.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kondisi sosial-budaya, pendidikan, dan politik yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi? (2) bagaimana konsep pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi? (3) bagaimana upaya Sutan Sjahrir memperjuangkan pemikiran demokrasi?. Tujuan melakukan kajian penelitian adalah (1) mengkaji kondisi sosial-budaya, pendidikan, dan politik yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi (2) mengkaji wujud pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi (3) mengkaji upaya Sutan Sjahrir memperjuangkan pemikiran demokrasi. Manfaat kajian dalam penelitian ini adalah (1) bagi peneliti, sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis memperdalam pengetahuan tentang pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi; (2) bagi mahasiswa dan calon guru sejarah, dapat menambah

penguasaan materi sejarah intelektual; (3) bagi almamater, sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yaitu Pendekatan Sosiologi Pengetahuan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis.

Hasil dari pembahasan yaitu kondisi sosial budaya yang mempengaruhi pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi yakni adat minangkabau, islam, dan pendidikan keluarga yang diperoleh dari kedua orang tuanya. Kondisi politik Indonesia yang terjajah, aktifitas Sutan Sjahrir di organisasi politik dan pendidikan bergaya Belanda yang diterima turut mempengaruhi pemikirannya. Pengaruh lingkungan tersebut mempengaruhi konsep demokrasi ala Sutan Sjahrir. Demokrasi Indonesia yang berdasarkan ideologi Sosialisme Kerakyatan. Demokrasi politik yang diwujudkan dengan pemerintahan sistem parlementer. Demokrasi ekonomi yang berciri pembangunan berdasarkan kerjasama negara dan masyarakat, ekonomi nasional, serta merubah sifat boros dan feodal. Demokrasi sosial dalam pandangan Sutan Sjahrir adalah demokratisir seluruh alat kekuasaan negara dan revolusi kerakyatan. Perjuangan Sutan Sjahrir untuk mewujudkan pemikirannya tentang demokrasi Indonesia yakni melalui partai politik seperti PNI-Baru, Partai Sosialis dan PSI. Selain itu Sutan Sjahrir memimpin BP-KNIP dan menjabat sebagai Perdana Menteri pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia yakni dalam kabinet Sutan Sjahrir I, II dan III.

Simpulan dari pembahasan berusaha untuk menjawab permasalahan yaitu *Pertama*, lingkungan sosial-budaya Minangkabau, politik kolonial dan pendidikan kolonial mempengaruhi munculnya pemikiran demokrasi Indonesia Sutan Sjahrir. *Kedua*, Konsep pemikiran Sutan Sjahrir adalah sosialisme kerakyatan, demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. *Ketiga*, upaya Sutan Sjahrir dalam memperjuangkan demokrasi Indonesia yakni melalui partai politik, memimpin BP-KNIP dan menjabat Perdana Menteri Indonesia dalam kabinet Sutan Sjahrir.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pemikiran Sutan Sjahrir tentang Demokrasi Indonesia tahun 1926-1962”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Drs. Sumarjono, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini;
4. Dr. Sumardi, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga terselesainya skripsi ini;
5. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
6. (Alm) Drs. Sutjitro, M.Si dan Prof. Bambang Soepeno, M.Pd, Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama menyelesaikan studi di Pendidikan Sejarah;
8. Kedua orang tuaku yang tiada kenal lelah dalam memberi kasih sayang, mendidik, memberikan doa, dan memberikan motivasi selama ini;
9. Saudara kandungku Rusminingsih, Putri Sulastri dan Saiful Bahri serta seluruh keluargaku yang menjadi semangat dalam penulisan skripsi ini;
10. Novita Ayu Karisma yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan demi terselesainya skripsi ini;

11. Kawan-kawan GmnI Komisariat FKIP mas Doni, mas Sanda, mas Hasan, mas Jefri, Aries pak kom, Samid, Clip, Dofer, Diva, Ferman Kopok, Rofi, Mandrak, Jimmy, Diana, Asa, Tio, Autin, Holi, Enggar, Fiko, Andi, Soleh, Nizam dkk lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu;
12. Kawan-kawan seperjuangan pengurus Komisariat GmnI FKIP tahun 2013 Robet, Wildan, Ridho, Guruh, Uun, dan Naima;
13. Kawan-kawan seperjuangan pengurus HMP Kelamas periode 2013-2014 Tri, Anas, Teguh, Bayu, Mala, Linda, Bili, serta pengurus lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
14. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2011 dan 2012 yang terus memberi motivasi dalam perkuliahan maupun berorganisasi;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Setiap karya yang dihasilkan manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis menerima dengan tangan terbuka segala bentuk kritik yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, April 2016

Penulis

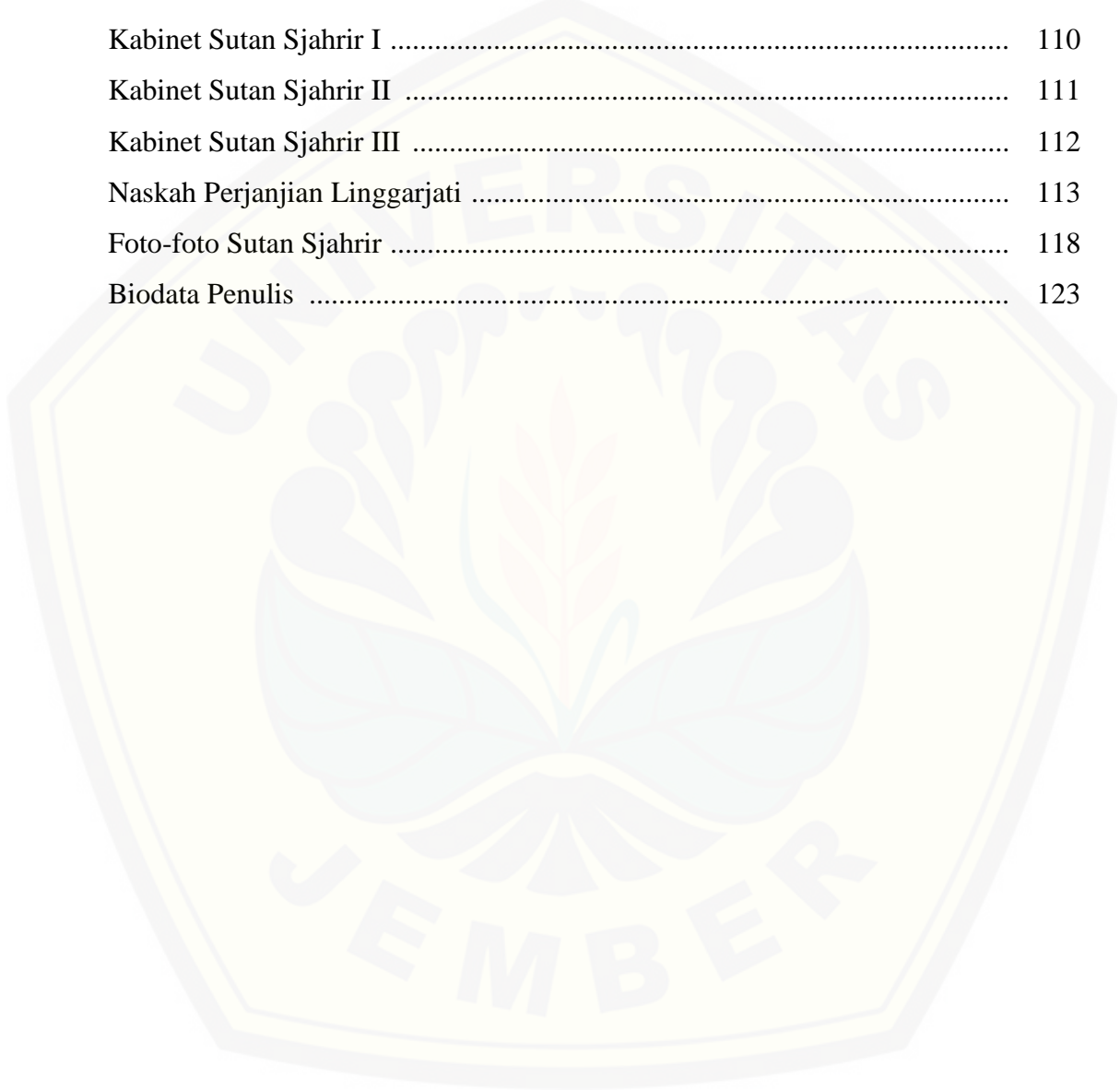
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB 3. METODE PENELITIAN	18
BAB 4. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL-BUDAYA, PENDIDIKAN DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR	22
4.1 Lingkungan Sosial-Budaya	23
4.2 Lingkungan Pendidikan	26
4.3 Lingkungan Politik	33
BAB 5. KONSEP DAN PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG DEMOKRASI	39
5.1 Konsep Tentang Demokrasi	40
5.2 Demokrasi Dalam Pandangan Sutan Sjahrir	43

5.2.1 Sosialisme Kerakyatan	44
5.2.2 Demokrasi Politik	49
5.2.3 Demokrasi Ekonomi	51
5.2.4 Demokrasi Sosial	55
BAB 6. UPAYA SUTAN SJHRIR UNTUK MEWUJUDKAN	
DEMOKRASI	60
6.1 Perjuangan Sutan Sjahrir Melalui Partai Politik	61
6.1.1 Partai Nasional Indonesia-Baru	61
6.1.2 Partai Sosialis	65
6.1.3 Partai Sosialis Indonesia	68
6.2 Perjuangan Sutan Sjahrir Melalui BP-KNIP	72
6.3 Perjuangan Sutan Sjahrir Melalui Kabinet Sjahrir	77
6.3.1 Pelaksanaan Kabinet Sutan Sjahrir I	79
6.3.2 Pelaksanaan Kabinet Sutan Sjahrir II	82
6.3.3 Pelaksanaan Kabinet Sutan Sjahrir III	88
6.4 Sumbangan Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi	
Terhadap Indonesia	98
BAB 7. PENUTUP	100
7.1 Kesimpulan	100
7.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Matrik Penelitian	107
Maklumat Presiden No X	108
Kabinet Sutan Sjahrir I	110
Kabinet Sutan Sjahrir II	111
Kabinet Sutan Sjahrir III	112
Naskah Perjanjian Linggarjati	113
Foto-foto Sutan Sjahrir	118
Biodata Penulis	123



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi dalam koridor NKRI tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Amir Sjarifuddin, Tan Malaka, Ahmad Soebarjo, dan salah satu tokoh pemikir penting sistem demokrasi Indonesia yaitu Sutan Sjahrir (Gambar 1). Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah (Agung, 2013:110). Demokrasi dalam pembagian kekuasaan suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica* dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat yang digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Konsep *trias politica* membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran ketiga jenis lembaga pemerintahan diperlukan agar ketiga lembaga negara bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Ketiga jenis lembaga tersebut adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif (Budiman, 35 : 1996).

Demokrasi Sutan Sjahrir merupakan perwujudan dari Sosialisme developmental Sutan Sjahrir. Sosialisme yang tidak segan akan kolonialisme, imperialisme, komunisme, fasisme dan totaliterisme. Sosialisme yang memberikan penyadaran kepada rakyat sebagai warga negara, terutama hak-hak demokrasi. Pemikiran kemerdekaan seutuhnya dituangkan dalam demokrasi dan untuk mencapai hal tersebut langkah pertama adalah revolusi nasional (kemerdekaan) yang nantinya disusul oleh revolusi sosial. (Sutan Sjahrir, 1945 : 5) Hal tersebut perlu dilakukan agar cita-cita perjuangan dan demokrasi benar-benar menunjukkan peran serta rakyat.

Hal yang menarik untuk dikaji yakni munculnya pemikiran demokrasi dalam diri Sutan Sjahrir. Perkembangan kondisi politik di Indonesia menyebabkan tersebarnya berbagai macam ideologi di kalangan pemimpin republik masa kemerdekaan terutama sosialisme yang menarik minat Sutan Sjahrir. Ideologi adalah keseluruhan sistem ide atau gagasan yang secara normatif memberikan

persepsi, landasan, dan pedoman tingkah laku seseorang atau masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan yang dicita-citakan (Agung, 2013 : 5). Sebagai bukti mulai tersebar nya sosialisme yakni munculnya berbagai organisasi politik modern seperti Sarekat Islam, PNI, Perhimpunan Indonesia, PNI-Pendidikan, Partindo dll . Organisasi yang tentunya dibentuk oleh tokoh – tokoh dari latar belakang pemikiran politik yang berbeda. Perbedaan yang muncul ini menandai adanya perdebatan ideologi dan konflik di dalamnya.

Keanekaragaman pemikiran politik ini menarik bagi Herberth Feith dan Lance Castles untuk menganalisis pemikiran politik di Indonesia setelah kemerdekaan. Pemikiran politik di Indonesia dibagi menjadi tiga periode yakni *pertama*, periode revolusi bersenjata (1945-1949), *kedua*, periode liberal (1950-1959), dan *ketiga*, periode demokrasi terpimpin (1959-1965). Feith menyimpulkan bahwa ada 5 ideologi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yakni tradisionalisme jawa, islam, nasionalisme radikal, komunisme dan sosialisme demokratis. Sosialisme demokratis meletakkan perhatian partai terhadap kebebasan individu, keterbukaan terhadap arus intelektual dunia dan penolakan terhadap chauvinisme (Feith dan Castles, 1988 : 227-229).

Sutan Sjahrir menganut sosialisme demokratis yang pada awal abad ke 19 banyak berkembang di negara-negara liberalis. Sutan Sjahrir mendalami buku karangan Hilferding dan Rosa Luxemburg serta beberapa tokoh sosialisme seperti Karl Kautsky, Otto Beuer, dan Hendrik de Man. Sutan Sjahrir secara tidak langsung tertarik akan pikiran orang-orang Marxis (Anwar, 2010:297). Hal ini menjadi sebuah ironi karena masyarakat tradisional Indonesia menurut sejarahnya merupakan negara dengan sistem feodal yang kuat antara raja dan rakyatnya (Agung, 2013 : 17). Sistem feodal sangat mengepankan kedaulatan raja sebagai bentuk kedaulatannya. Sedangkan demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai bentuk kedaulatannya. Sutan Sjahrir nampaknya ingin mendobrak tradisi lama masyarakat Indonesia melalui pemikirannya sehingga menarik untuk dikaji.

Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah Sutan Sjahrir mengembangkan sosialisme kerakyatan sebagai ideologi untuk mencapai masyarakat yang

demokratis. Sosialisme kerakyatan adalah sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Sosialisme kerakyatan memiliki ciri khasnya sendiri untuk mencapai masyarakat yang demokratis. Sosialisme kerakyatan mendukung cara-cara revolusioner untuk mencapai kedaulatan rakyat. Revolusi nasional dan revolusi sosial merupakan cara revolusioner sosialisme kerakyatan yang diharapkan dapat merubah mental masyarakat Indonesia yang feodal. Terlebih kondisi Indonesia yang terjajah selama kurang lebih 350 tahun lamanya karena feodalisme dibungkus secara rapi oleh kaum kolonialis. Sehingga masyarakat Indonesia mudah dibodohi dan patuh terhadap kedaulatan raja dan sendi-sendi demokrasi belum ada sama sekali. Masyarakat Indonesia patuh pada kekuasaan pemerintah pada masa itu, sehingga penjajahan dapat berlangsung cukup lama bercokol di Indonesia.

Jika diruntut menurut sejarahnya sosialisme merupakan sebuah gerakan protes terhadap ekonomi kapitalis. Sosialisme menuntut reformasi secara sosial dan ekonomi sehingga tidak ada lagi kelas sosial dan penguasaan ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu. Tujuan gerakan ini sebenarnya adalah untuk mewujudkan masyarakat sosialis dengan jalan mengendalikan sarana produksi dan memperluas tanggung jawab negara bagi kesejahteraan rakyat. Perkembangan ideologi sosialisme pada era selanjutnya memiliki pola yang unik tergantung tempat ideologi tersebut berkembang. Meskipun berbeda sosialisme masih tetap memiliki tuntutan yang sama yakni dalam hal kepemilikan dan kontrol bersama alat produksi. Sekian banyaknya sosialisme di dunia, terdapat dua jenis sosialisme yang berkembang pesat yakni sosialisme – demokratis dan sosialisme – komunis. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sosialisme itu sendiri yakni mewujudkan masyarakat sosialis. Perbedaannya juga akan tampak dari kehidupan tempat paham itu diterapkan (Agung, 2013 : 133-136).

Perkembangan Sosialisme ini juga mempengaruhi tokoh pergerakan Indonesia dari yang berpandangan nasionalis sampai Islam seperti Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta dan Sutan Sjahrir. Perkenalan Sutan Sjahrir dengan sosialisme demokrat ketika Sutan Sjahrir belajar di Belanda. Sosialisme demokratis pada

akhirnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terjajah. Cara evolusioner seperti pendidikan politik dibungkus menjadi cara revolusioner oleh Sutan Sjahrir. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia yang masih terjajah sehingga perlu diutamakan kemerdekaan atau revolusi nasional. Sosialisme demokratis yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia menghasilkan pemikiran baru bagi Sutan Sjahrir yakni ideologi sosialisme kerakyatan, sosialisme ala Indonesia yang menarik pula untuk dikaji.

Beberapa upaya yang dilakukan Sutan Sjahrir untuk mencapai masyarakat yang demokratis adalah melibatkan rakyat dalam politik. Hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyadarkan rakyat melalui pendidikan untuk mencapai revolusi sosial. Revolusi sosial di Indonesia bertujuan mencapai masyarakat yang demokratis seperti yang diutarakan Sutan Sjahrir :

Keluar bentuk revolusi kita berupa nasional, kedalam menurut hukum demokratis dengan corak sosial. Jika kurang memahamkan kebenaran sehingga kedalam pun yang kita anjurkan hanya revolusi nasional saja dengan tidak ada atau kurang pengertian tentang kedudukan demokrasi di dalam pengubahan masyarakat. (Sutan Sjahrir, 1945:10)

Sutan Sjahrir menginginkan demokrasi dalam arti yang lebih luas. Demokrasi yang tidak hanya dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang sosial dan ekonomi. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat yang dituangkan dalam organisasi politik (partai) untuk menyampaikan aspirasi rakyat sehingga pemerintahan dijalankan oleh dewan-dewan perwakilan rakyat (Sutan Sjahrir, 1947 : 49).

Sutan Sjahrir sependapat seperti tokoh-tokoh lain sejamannya dalam menerapkan demokrasi ala Indonesia. Demokrasi yang mencari selamatnya rakyat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Sehingga rakyat tidak lagi terjajah dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Namun, cita-cita demokrasi Indonesia ala Sutan Sjahrir dibenturkan pula pada keadaan Indonesia yang baru merdeka, sehingga apa yang dicitakan oleh Sutan Sjahrir berbeda dengan yang diwujudkan dalam pelaksanaannya. Sutan Sjahrir menginginkan adanya pemilihan umum

sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Namun pada kenyataannya, Sutan Sjahrir belum dapat mengimplementasikan cita-citanya. Sutan Sjahrir diberi pilihan untuk membuat stigma negara Indonesia sebagai negara yang merdeka atas keinginan rakyat. Sehingga Sutan Sjahrir merubah KNIP dari sebuah badan pembantu Presiden menjadi badan legislatif yakni parlemen. Pemerintah Soekarno didesak mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 yang memberikan kesempatan kepada rakyat mendirikan partai politik sehingga rakyat memiliki andil dalam pengambilan keputusan dimana wakilnya duduk dalam parlemen yang demokratis (Anwar 2011 : 53-54). Sehingga terjadi pergeseran kekuasaan dari Presiden kepada Perdana Menteri. Pergantian ini diikuti dengan perubahan sistem presidensil ke parlementer, hal ini sebenarnya telah melanggar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersirat dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD”. Pergeseran kekuasaan ini terjadi karena tindakan seseorang tidak lepas dari ideologi yang dianut, termasuk apakah usaha Sutan Sjahrir menerapkan sistem pemerintahan parlementer merupakan wujud sumbangsih Sutan Sjahrir dalam menerapkan demokrasi Indonesia merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut.

Sumbangsih pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi untuk Indonesia tidak lepas dari kondisi sosial-budaya, pendidikan dan politik yang di alami selama masa hidupnya. Pengaruh lingkungan dalam membentuk pemikirannya tentang demokrasi menarik dikaji, karena mengingat sumbangsih pemikirannya juga mempengaruhi sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal di Indonesia tahun 1950-1959 (Anwar, 2011 : 108). Selain pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, Sutan Sjahrir juga merupakan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sutan Sjahrir berusaha untuk memaksimalkan keikutsertaan rakyat dalam kancah perpolitik nasional. Sutan Sjahrir merumuskan gerakannya sebagai sosialisme kerakyatan dan merumuskan negara progresif sebagai sistem demokratis dengan pemilihan umum dan pemerintah berdasarkan keinginan warga yang memilih (Mrazek 1996 : 761). Demokrasi yang diusung oleh Sutan Sjahrir merupakan alat perjuangan dari sosialisme kerakyatan. Pada

periode 1950-1960 walaupun kader PSI yang berada dalam parlemen sangat sedikit namun mampu memberi dasar demokrasi bagi Indonesia.

Dari uraian paragraf diatas tujuan Sutan Sjahrir untuk memberi warna tersendiri dalam perpolitikan Indonesia dengan jalan demokrasi adalah suatu pilihan. Pemikiran Sutan Sjahrir menjadi lebih menarik mengingat peran sertanya dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka yang penuh dengan ironi hingga akhir hayatnya. Bahkan dalam kebanyakan buku sejarah, nama Sutan Sjahrir seolah dipinggirkan perannya sehingga perlu adanya kajian yang mendalam baik peran serta pemikirannya dalam sejarah Indonesia. Latar belakang Sutan Sjahrir mengembangkan sosialisme kerakyatan untuk mencapai tujuan kedaulatan rakyat juga menarik dikaji. Segala aspek kehidupan Sutan Sjahrir telah membawanya pada pilihan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang demokratis. Upaya menciptakan partai sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi rakyat juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan Sutan Sjahrir. Selain itu, pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi tidak kalah dengan tokoh lain bahkan Sutan Sjahrir dengan kadernya yang sedikit mampu mempengaruhi kebijakan politik tahun 1950-1959. Pemikiran dan perjuangan Sutan Sjahrir juga banyak dijadikan pembandingan dengan pemikiran tokoh lain seperti Soekarno, Tan Malaka dan tokoh lain sejamannya. Oleh karena itu untuk membahas lebih mendalam mengenai pemikiran dan perjuangan Sutan Sjahrir peneliti memilih menulis Skripsi dengan judul : *“Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi tahun 1926-1962”*

1.2 Penegasan Pengetian Judul

Pemikiran menurut Swastika (dalam Sari, 2008:8) adalah kegiatan akal pikir manusia untuk mendapat kebenaran yang baru berdasarkan kebenaran-kebenaran yang telah ada. Tentunya dalam penulisan skripsi ini pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran Sutan Sjahrir. Sedangkan Poespoprojo (1991:174) pemikiran adalah aksi melalui mana pikiran mendapat pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui.

Sutan Sjahrir (1947 : 49) menuliskan pokok pikirannya arti dari demokrasi ialah pemerintah yang dilakukan oleh dewan-dewan perwakilan. Sehingga rakyat memiliki kedaulatan dalam politik melalui dewan perwakilan.

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dari judul penelitian Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi Indonesia adalah pikiran Sutan Sjahrir tentang pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial dilakukan melalui sistem pemerintahan parlementer.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian dimaksudkan untuk memberikan batasan pada pembahasan skripsi serta meminimalisir pelebaran fokus permasalahan. Batasan yang dimaksud peneliti yakni temporal (waktu), tempat (spasial) dan materi. Peneliti dalam membuat naskah membatasi materi dengan kajian sejarah pemikiran atau intelektual. Pokok-pokok yang ingin dibahas oleh peneliti adalah latar belakang munculnya pemikiran Sutan Sjahrir, konsep pemikiran Sutan Sjahrir serta upaya yang dilakukan oleh Sutan Sjahrir untuk mewujudkan pemikirannya.

Batasan temporal (waktu) digunakan sebagai ciri khas pembahasan sejarah yakni peristiwa masa lampau. Tahun 1926 dijadikan sebagai awal penelitian karena pada tahun tersebut merupakan awal tahun Sutan Sjahrir terjun dalam politik. Pendidikan Sutan Sjahrir di AMS Bandung pada tahun 1926 merupakan awal perpolitikan Sutan Sjahrir. Selain itu, Sutan Sjahrir bergabung dengan organisasi Jong Indonesie dan pernah tercatat sebagai salah satu pimpinan rapat. Jong Indonesie memiliki banyak cabang di kota besar lainnya dan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peneliti memandang faktor sosio-kultural juga turut serta membentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi. Pendidikan bergaya barat yang diterima dan kondisi masyarakat pada periode 1926 di Indonesia merupakan puncak kesadaran diri seorang Sutan Sjahrir. Namun seperti layaknya pemuda seperti pada umumnya peran serta lingkungan membentuk kepribadian sosial Sutan Sjahrir.

Sedangkan tahun 1962 dijadikan sebagai batas akhir penelitian karena pemikiran Sutan Sjahrir sudah mulai dilupakan dan tidak lagi memiliki wadah perjuangan. PSI sebagai partai yang berciri khas Sosialisme Kerakyatan ala Sutan Sjahrir pada tahun 1958 telah dibubarkan. Pembubaran PSI membawa dampak pemikiran Sutan Sjahrir tidak memiliki wadah lagi dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Rentetan peristiwa pemberontakan dan percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno tahun 1958 di Makassar telah menyeret nama Sutan Sjahrir dan PSI dalam masalah yang berakhir pada penahanan Sutan Sjahrir tanpa pengadilan tahun 1962. Sejak ditahan kesehatan Sutan Sjahrir berangsur menurun dan pelarangan aktifitas PSI dalam politik telah menenggelamkan pemikiran Sutan Sjahrir.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan masalah dan uraian ruang lingkup penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana kondisi sosial-budaya, pendidikan, dan politik yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi?
2. bagaimana konsep pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi ?
3. bagaimana Sutan Sjahrir memperjuangkan pemikiran demokrasi?

1.5 Tujuan Penelitian

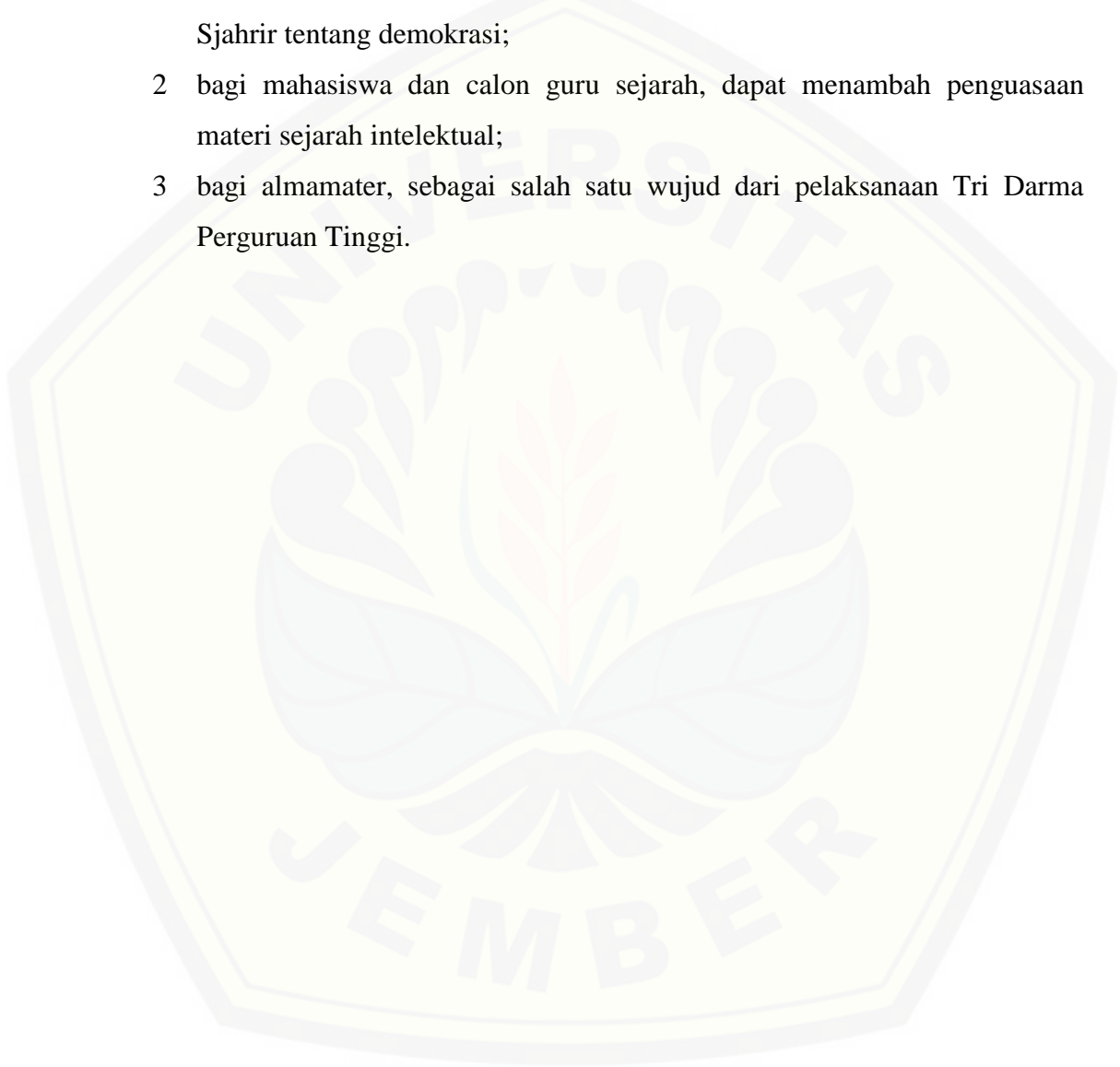
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yakni :

1. mengkaji kondisi sosial-budaya, pendidikan, dan politik yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi;
2. mengkaji wujud pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi;
3. mengkaji usaha-usaha yang dilakukan Sutan Sjahrir dalam memperjuangkan demokrasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1 bagi peneliti, sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis memperdalam pengetahuan tentang pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi;
- 2 bagi mahasiswa dan calon guru sejarah, dapat menambah penguasaan materi sejarah intelektual;
- 3 bagi almamater, sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.



BAB 2. TINJUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dalam penelitian Sejarah merupakan peninjauan kembali tentang tulisan maupun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka ini berisi penjabaran mengenai pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi baik dari buku maupun penelitian-penelitian terdahulu serta kajian tentang sistem pemerintahan yang demokratis. Selain itu, dalam pembahasan ini juga akan diungkapkan pendekatan serta teori yang digunakan.

Sosialisme dalam buku *Isme-isme dewasa ini* (1994 : 208-228) menjelaskan tentang latar belakang munculnya sosialisme pertama kali di Inggris dengan pelopornya yaitu Robert Owen yang merupakan tokoh kapitalis sosialis. Sosialisme secara aplikatif dianggap sebagai antitesis dari kapitalisme. Kenyataannya dalam praktek, ekonomi terbagi menjadi perekonomian pasar bebas dan kemakuran, serta ekonomi terpimpin. Baik kapitalisme dan sosialisme termasuk dalam kelompok yang didominasi oleh konsep perekonomian pasar bebas dan kemakmuran. Sosialisme juga mewarisi tujuan pokok yang sama dari kapitalisme, yaitu melestarikan faktor tenaga kerja dan kepemilikan. Selain itu kapitalisme dan sosialisme mempunyai asumsi dasar yang sama yakni adanya hak atas harta milik tertentu ditentukan oleh kerja, usaha dan industri. Kaum sosialis yakin kunci untuk membuat seseorang menjadi lebih rasional dan kooperatif adalah pemerintahan yang memiliki sistem pendidikan nasional yang baik sehingga setiap orang dapat dibekali dengan keadilan yang dapat digunakannya untuk mendapatkan pekerjaan dalam pasaran terbuka.

Sutan Sjahrir (1990 : 26-38) menulis dalam suratnya kepada Maria Deutcheau yang disusun menjadi sebuah buku berjudul *Renungan dan Perjuangan* menjelaskan bahwa Sutan Sjahrir sering membaca buku Ortega Y Gassert, Alkitab Bibbel, Marx, de Kuddt, Freud, Russel, Kant dan buku lain yang di dapatnya selama pengasingan. Sutan Sjahrir berusaha memahami tentang individu dan kolektivitas yang nanti akan menjadi dasar pertentangan Sutan Sjahrir dalam mewujudkan sosialismenya di tahanan selama 8 tahun. Semasa dalam penahanan periode 1934-1942 Sutan Sjahrir semakin sadar akan hak bangsa Indonesia untuk

merdeka dan menentukan sendiri nasibnya. Sutan Sjahrir semakin sadar bahwa penindasan yang dilakukan oleh bangsa kolonial terhadap rakyat haruslah segera dimusnahkan. Buku renungan dan perjuangan juga menjelaskan pemikiran Sutan Sjahrir selama di pengasingan. Sutan Sjahrir mulai menggeluti pemikir-pemikir sosialis demokratis yang akan mempengaruhi pemikiran dan tindakannya. Sutan Sjahrir menginginkan kemerdekaan untuk membuka jalan demokrasi bagi rakyat. Sehingga rakyat mampu mandiri dan dapat mengelola segala sumber kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Semasa pengasingan ini pula ia belajar lebih tentang arti toleransi dan realisme. Faktor inilah yang membuat Sutan Sjahrir merasa perlu dan selalu memilih jalan moderasi dan kompromi sejauh apa yang dapat dilaksanakan secara politis dan ekonomi.

Leirissa (1985 : 97-101) menjelaskan tentang peranan Sutan Sjahrir dalam perang kemerdekaan. Sutan Sjahrir dianggap berjasa karena berusaha untuk menghubungkan pemerintah dan rakyat. Sutan Sjahrir mampu melihat jauh ke depan seperti tampak dalam tulisannya perjuangan kita. Revolusi Indonesia adalah revolusi yang demokratis berasaskan sosialisme. Sutan Sjahrir membentuk lembaga-lembaga parlemen bergaya barat. Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) serta memberlakukan kebebasan partai politik untuk berdiri. Hal ini dilakukan untuk membuka peran serta rakyat dalam negara. Demokrasi yang dicitakan Sutan Sjahrir adalah demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kepentingan itu dapat diserap melalui partai-partai politik yang akan duduk di parlemen. Menenangkan massa ketika perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah suatu hal yang tidak mudah. Sutan Sjahrir dihadapkan pada perbedaan antara golongan yang mendukung diplomasi dan perjuangan fisik. Sutan Sjahrir dengan kepiawaiannya telah menuntut republik pada demokrasi.

Hal ini juga dijelaskan dalam skripsi Qomariatul Badriah (2013 : 32-48) Sutan Sjahrir bertujuan untuk mewujudkan cita-cita sosialis yaitu melalui sistem parlementer yang dianggap demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis akan berdampak pada bidang lain yakni sosial dan ekonomi. Pikiran tersebut dicurahkan pada pelaksanaan sistem parlementer ketika Sutan Sjahrir

menjadi Perdana Menteri pertama. Perundingan Linggarjati yang merupakan usaha Sutan Sjahrir untuk mendapat pengakuan internasional telah memberikan banyak konsesi kepada Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Sehingga terjadi pertentangan antara pendukung perjuangan fisik yang dipimpin oleh Tan Malaka dan perjuangan diplomasi yang diusahakan kabinet Sutan Sjahrir. Sejatinya kedua perjuangan tersebut menginginkan suatu hal yang sama yakni kemerdekaan 100%. Namun karena tidak adanya sokongan dari partai penyokong dampak dari perjanjian Linggarjati, Sutan Sjahrir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Sutan Sjahrir menunjukkan bagaimana bertindak sesuai hukum demokrasi. Sutan Sjahrir memilih mengutamakan pendidikan politik daripada menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kemauannya.

Pemerintahan demokrasi tetaplah memiliki dampak yang perlu diperhitungkan seperti dalam buku karya Robert A Dahl tentang pemerintahan demokrasi (2001 : 60-85). Pemerintahan demokrasi dalam penerapannya tidak dapat sepenuhnya menjamin rakyatnya akan bahagia, makmur, sehat, bijaksana, damai dan adil. Pemerintah demokratis tidak akan mampu memenuhi tujuan demokrasi karena faktor kepemilikan individu dalam negara merupakan usaha individu. Sehingga terjadi ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Bahkan dalam prakteknya cenderung jauh dari tujuannya. Keuntungan yang dihasilkan demokrasi yang kiranya membuat lebih diharapkan daripada alternatif lain yang memungkinkan dalam beberapa hal. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat, menjamin hak asasi warga negara, melindungi kepentingan dasar rakyat, dan hanya demokrasi yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang untuk menggunakan kebebasannya menentukan nasibnya sendiri.

Sedangkan konsep negara demokrasi dijelaskan oleh Mahfud (2000 : 18-36) sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat

karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya mengatur tentang kehidupan sosial rakyat namun mencakup dimensi ekonomi supaya mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Demokrasi sebagai dasar hidup telah berkembang di Indonesia sejak sebelum adanya konsep bangsa Indonesia. Demokrasi tersebut yaitu berupa kehidupan berkelompok dan berkembang pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia awal abad ke 20. Demokrasi dalam kehidupan bernegara terus menggemakan dan mengkrystal sejak tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI dengan konsepnya geopolitik. Sebab itu pemikiran demokrasi dalam kaitannya dengan peranan negara dan rakyat dapat dimulai dari awal abad ke 20.

Perjuangan untuk meletakkan dasar demokrasi di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Sutan Sjahrir ketika menjabat sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia. Pemikiran Perjuangan Sutan Sjahrir dalam mempertahankan kemerdekaan dibahas oleh Rima Romansyah (2013 : 32-48), dijelaskan bahwa Sutan Sjahrir mendambakan kebebasan untuk setiap orang, yaitu individu yang menggunakan akal pikirnya untuk bertanggung jawab atas cita-cita dan perbuatan yang dilakukannya. Sutan Sjahrir selama hidup di Indonesia dan Belanda telah terpengaruh oleh keadaan rakyat yang miskin dan bodoh, hal ini membuat Sutan Sjahrir berkeyakinan untuk menciptakan kekuatan yang maha besar maka haruslah timbul kesadaran dari rakyat. Pendidikan bagi rakyat ditujukan untuk terciptanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pemikiran Sutan Sjahrir yang anti feodal, fasis dan kapitalistik mempengaruhi segala kebijakan politik yang Sutan Sjahrir dambakan. Sehingga Sutan Sjahrir menentang keras kegiatan kerjasama dengan pemerintah Militer Jepang. Hal ini baginya hanyalah pencideraan nilai-nilai perjuangan. Pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosial budaya bagi Sutan Sjahrir adalah dunia timur tidak boleh begitu saja mengikuti dan meniru bangsa barat. Namun begitu bukan berarti tidak dapat menerima budaya barat, akan tetapi tetap melaksanakan politik bebas aktif. Agar Indonesia mampu berdiri sejajar dan hidup berdampingan bersama bangsa – bangsa lain di dunia. Pemikiran ekonomi Sutan Sjahrir yaitu sistem ekonomi

berdasarkan hak milik bersama atau sistem ekonomi sosialis, dimana seluruh penghasilan diatur menurut keperluan masyarakat sehingga tidak mungkin lagi terjadi krisis karena persaingan. Keadilan bersama tersebut harus dijamin oleh pemerintah yang demokratis. Karena hal inilah Sutan Sjahrir menginginkan demokrasi dalam bidang politik.

Peran Sutan Sjahrir dalam politik tahun 1945-1949 dibahas oleh Onny Asyanto (2013 : 32-55) bahwa Sistem Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang diusahakan oleh Sutan Sjahrir dalam mencapai demokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa konsesi bahwa perjuangan kemerdekaan haruslah anti fasis, tujuan kemerdekaan agar tidak menimbulkan pemudaisme, serta kemungkinan perubahan sosial ekonomi pada tahun pertama kemerdekaan. Menurut Sutan Sjahrir kebijakan politik akan sangat berpengaruh kepada kekuatan imperialis, Sehingga jalan untuk menjamin kemerdekaan Indonesia adalah melalui jalan Diplomasi. Hal ini berkaitan dengan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Karena hanya negara yang berdaulat yang dapat menjalankan kewajibannya sebagai negara serta hidup dalam persaudaraan segala bangsa di dunia. Kebijakan politik dalam kabinet Sutan Sjahrir yang terjadi selama 3 periode mencoba untuk meletakkan dasar demokrasi di Indonesia. Periode pertama Sutan Sjahrir berusaha untuk memperbaiki sistem ketata negaraan dalam negeri. Periode kedua dalam kabinet Sutan Sjahrir mempunyai tugas untuk menata kebijakan politik kedalam maupun keluar negeri yang berupaya untuk membangun dan mengusahakan keterlibatan rakyat baik dalam negeri maupun kancah Internasional. Periode ketiga adalah kelanjutan usaha yang dilakukan kabinet Sutan Sjahrir untuk melanjutkan kebijakan pada periode sebelumnya karena penculikan yang dilakukan terhadap Sutan Sjahrir. Tiga periode tersebut diusahakan seaksimal mungkin oleh Sutan Sjahrir untuk meletakkan dasar demokrasi.

Mrazek (1996 : 519-522) mengungkapkan bahwa Sutan Sjahrir dianggap sebagai seorang yang layak dalam berbagai penafsiran dan perumusan sosialis dan demokrat. Bahkan van Mook mengungkapkan bahwa kabinet Sutan Sjahrir adalah kabinet yang bersih dari Jepang, susunan anggota kabinetnya bersih dari

kolaborasi Jepang. Kelompok Sutan Sjahrir tidak bermuka ganda, orang-orang yang sopan. Sifat lain dari Sutan Sjahrir adalah kepiawaiannya yang tenang dalam menghadapi berbagai permasalahan politik negaranya. Sutan Sjahrir tanpa rasa benci dan sentimen menandakan ia adalah orang yang bijak. Meskipun dalam arti yang berbeda bagi sebagian orang Indonesia. Sutan Sjahrir terlalu banyak memberi konsesi kepada Belanda. Terlebih pada perjanjian Linggarjati yang sebenarnya merupakan acuan dasar bahwa Belanda telah mengakui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang yang cerdas dalam melakukan diplomasi-diplomasi sebagai batu loncatan Soekarno-Hatta pada periode selanjutnya.

Buku Kepartaian di Indonesia (Kementerian Penerangan 1950 : 305-307) menjelaskan mengenai garis perjuangan Partai Sosialis Indonesia demi mewujudkan masyarakat sosialis membagi perjuangannya menjadi empat yakni Keadaan umum, Perjuangan di Asia, Negara Indonesia Merdeka, dan Politik Partai. Dalam buku ini dijelaskan secara singkat bahwa perang dunia II menyebabkan timbulnya susunan dan perbandingan kekuatan ekonomi serta kekuasaan politik dan militer yang baru di dunia. Hal ini berdampak pada perjuangan rakyat di Asia dan negara Indonesia merdeka. Negara yang baru merdeka menjadi wilayah baru untuk kepentingan negara-negara kapital. Memandang hal tersebut maka politik partai sosialis Indonesia memandang revolusi nasional belum selesai. Sehingga Indonesia harus melalui *demokratisering*. Inilah yang nantinya menjadi pandangan Sutan Sjahrir setelah menjabat sebagai Perdana Menteri. Partai Sosialis Indonesia dan Sutan Sjahrir mengkhawatirkan munculnya kaum buruh, tani dan kelas modal di Indonesia yang nanti akan mempersulit tercapainya masyarakat sosialis. Buku ini bisa menjadi pedoman penulisan dalam pembahasan karena ditulis seaman pada masa Sutan Sjahrir.

Setelah membaca uraian dalam pragraf diatas, dapat disimpulkan bahwa Sutan Sjahrir berupaya mewujudkan demokrasi melalui pikiran-pikirannya. Namun, pemikiran Sjahrir tentang demokrasi masih belum memiliki kerangka yang jelas. Sjahrir menuangkan konsep demokrasi melalui tulisan-tulisan yang

pernah diterbitkan. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pemikiran Sutan Sjahrir agar dapat dirangkai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah ilmu yang digunakan untuk memahami sistem intelektual, kesosialan, ideologi dan struktur pemikiran seseorang atau kelompok sosial. Sosiologi pengetahuan berusaha untuk mengetahui kaitan-kaitan struktur intelektual seseorang atau kelompok sosial berdasarkan konteks sosial dan hanya dapat diteliti dengan sarana sosiologi (Ankersmit, 1987 : 301). Struktur intelektual pada umumnya dapat dipahami dalam hubungannya dengan latar belakang sosio kultural masyarakat dimana pemikir hidup, yang telah secara khusus dipelajari dalam sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan sangat relevan untuk mengidentifikasi berbagai ideologi sehingga dapat diidentifikasi bentuk pemikirannya, ciri-ciri maupun struktur, pandangan hidup yang merangkai alam pikirannya (Kartodirjo, 1992 : 181). Pada penelitian pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi tahun 1926-1962 ini berusaha mengkaji pemikiran Sutan Sjahrir dalam kaitannya dengan ideologi sosialisme demokratis. Pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan struktur serta bentuk – bentuk pemikiran Sutan Sjahrir dalam penerapan demokrasi di Indonesia.

Sedangkan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori hermeneutika. Kajian teori hermeneutika mencoba untuk menerangkan dua hal yakni :

1. menafsirkan teks-teks dari masa silam
2. menerangkan perbuatan seorang pelaku sejarah.

hermeneutika menerangkan teks-teks untuk ditafsirkan, sedangkan perbuatan-perbuatan diterangkan. Menurut arti pertama kita melihat suatu kesatuan atau koherensi dalam sebuah teks, interpretasi teks tersebut untuk bahan sejarah agar dapat memahami suatu pendirian seseorang atau kelompok sosial. Sedangkan arti kedua mencoba mencari jawaban terhadap pertanyaan mengapa seorang pelaku sejarah berbuat sesuatu (Ankersmit, 1987 : 156). Ideologi yang dianut oleh Sutan Sjahrir adalah sosialisme demokratis. Tentunya dalam pilihan tersebut Sutan Sjahrir memiliki latar belakang sosio-kultural yang berpengaruh dalam dirinya.

Penggunaan teori hermeneutika dalam penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui latar belakang kebijakan yang dilakukan oleh Sutan Sjahrir serta usaha-usaha yang dilakukan Sutan Sjahrir untuk mencapai demokrasi melalui tulisan-tulisan serta peristiwa sejarah dalam kaitannya perilaku tokoh Sutan Sjahrir.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengisahan atas peristiwa – peristiwa masa lalu umat manusia (Abdurrahman 2007 : 13). Sudut pandang penulisan sejarah umumnya erat kaitannya dengan sikap hidup, pendekatan, atau orientasinya. Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang dikaji adalah mengenai pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian sejarah pemikiran atau sejarah intelektual. Peneliti dalam mengkaji sejarah pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi menggunakan metode sejarah yakni Heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Lebih jelasnya ke empat tahap tersebut dapat dilihat pada keterangan di bawah ini.

3.1 Heuristik

Penelitian pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi pada awalnya peneliti melakukan pengumpulan sumber sejarah. Peneliti dalam proses heuristik berusaha untuk mengidentifikasi sumber sejarah sebagai bahan penulisan. Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah sumber primer dan sumber sekunder. Untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut peneliti berusaha melakukan teknik dokumenter dengan mendatangi beberapa perpustakaan yakni Universitas Jember, Perpustakaan Kelamas, Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember , maupun koleksi pribadi peneliti.

Peneliti dalam melakukan heuristik menemukan sumber primer berupa tulisan Sutan Sjahrir yang telah diterjemahkan namun dapat dijadikan sumber primer karena isinya merupakan tulisan Sutan Sjahrir kepada Maria Deutcheau yang disusun dalam buku yang berjudul Renungan dan Perjuangan. Buku asli dari judul ini adalah (1) Indonesche Overpengizen. Selain itu pamflet Sutan Sjahrir berjudul (2) Perjuangan kita merupakan sumber yang dapat digunakan selain karena mengungkap ide-ide Sutan Sjahrir tentang demokrasi dan peran serta rakyat, buku ini merupakan tulisan Sutan Sjahrir (3) Buku Sosialisme, Indonesia dan Pembangunan juga merupakan buku hasil tulisan-tulisan Sutan Sjahrir. Sumber sekunder untuk menunjang sumber tersebut juga ada beberapa yang

ditemukan oleh peneliti yakni seperti (1) Mengenang Sutan Sjahrir karya Rosihan Anwar, (2) Sutan Sjahrir politik dan pengasingan di Indonesia (3) Sutan Sjahrir Negarawan Humanis Demokrat Sejati yang Mendahului zamannya, serta beberapa buku lain yang menurut peneliti dapat menunjang penelitian.

3.2 Kritik

Setelah proses pengumpulan sumber, langkah selanjutnya adalah Verifikasi atau kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber (Pranoto 2010 : 34) Kritik sumber bertujuan untuk mendapatkan keabsahan sumber . Terdapat kritik eksternal dan kritik internal dalam Verifikasi atau kritik. Kritik eksternal dilakukan dengan melakukan penelitian fisik terhadap sumber untuk membuktikan otentisitasnya. Sedangkan kritik internal untuk memahami isi teks agar peneliti dalam melakukan penelitian mendapatkan fakta yang dapat dipercaya / kredibel.

Setelah melakukan kritik eksternal dengan mengecek pada materi jenis fisik seperti tahun terbit, pengarang dan penerbit pada sumber, peneliti selanjutnya melakukan kritik internal dengan cara menilai secara kritis terhadap sumber dengan membanding-bandingkan sumber yang satu dengan yang lainnya. Semua sumber yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti ternyata setelah dilakukan kritik eksternal dan internal dapat disimpulkan memenuhi persyaratan untuk dijadikan sumber dalam penelitian. Kegiatan kritik terhadap sumber yang diperoleh peneliti berusaha untuk menemukan fakta yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian yakni fakta tentang latar belakang munculnya pemikiran Sutan Sjahrir, perjuangan Sutan Sjahrir pada masa sebelum kemerdekaan, perjuangan Sutan Sjahrir mencapai demokrasi pada masa setelah kemerdekaan, serta dampak pemikiran Sutan Sjahrir terhadap jalannya politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Terpimpin.

3.3 Interpretasi

Langkah ketiga dalam penelitian sejarah adalah interpretasi atau sering disebut juga dengan analisis sejarah . Kuntowijoyo dalam (Abdurrahman 2007 :

73) ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yakni analisis yaitu menguraikan dan sintesis yakni meyatukan. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh fakta yang diperoleh dari sumber sejarah serta menggunakan teori untuk menyusun fakta-fakta. Peneliti dalam melakukan proses interpretasi sejarah berusaha menguraikan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Penelitian Sutan Sjahrir tentang demokrasi Indonesia dalam proses interpretasi tentu haruslah mencari sintesis tentang asal atau latar belakang pemikiran Sutan Sjahrir itu muncul. Tentunya untuk memudahkan penulisan Pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi ini maka peneliti juga menggunakan pendekatan dan teori. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi pengetahuan, sedangkan teori yang digunakan adalah teori hermeneutika. Sehingga setelah peneliti dapat mengumpulkan data dan melakukan kritik, peneliti dapat menguraikan dan menyatukan fakta itu menjadi sumber yang bermakna.

3.4 Historiografi

Selanjutnya langkah terakhir adalah Historiografi. Historiografi adalah cara penulisan ,pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurrahman 2007 : 76). Penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses dari awal hingga akhir. Penelitian sejarah ini akhirnya merupakan penulisan secara kronologis, logis, dan sistematis .

Metode penyajian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maksudnya adalah mengadakan analisa terhadap sumber sejarah sehingga menjadi fakta yang benar dan dipercaya, kemudian mengadakan pengkajian atau interpretasi secara teliti dan merekonstruksi secara sistematis dengan kausalitas yang benar sehingga menghasilkan suatu kisah sejarah yang konkrit terkait dengan penelitian ini. Tentunya dalam penulisan ini peneliti berusaha merangkai fakta – fakta sejarah sebagai hasil penafsiran sehingga diperoleh suatu kisah secara ilmiah. Namun dalam penulisan ini tentunya akan ada subjektifitas terhadap tokoh Sutan Sjahrir. Semua itu bukan karena

kecintaan atau membela Sutan Sjahrir dalam peristiwa-peristiwa tertentu akan tetapi berusaha memperjelas masalah yang dikaji.



BAB 4 KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL-BUDAYA, PENDIDIKAN DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR

Nama Sutan Sjahrir tidak begitu banyak disebut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Padahal, perjuangan serta pemikirannya banyak memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Sutan Sjahrir sering diidentikkan dengan seorang politisi, diplomat, pendidik bahkan cendekiawan. Sutan Sjahrir mendalami sastra, filsafat, psikologi, ekonomi, politik, hukum, ilmu-ilmu pasti, hingga perbandingan agama. Sutan Sjahrir menyampaikan kekaguman, komentar, dan juga kritiknya terhadap pemikiran-pemikiran ilmiah dengan cara yang ilmiah pula. Sutan Sjahrir percaya pada perjuangan dengan cara demokratis dan sebisa mungkin menghindari penggunaan kekerasan.

Sutan Sjahrir merupakan salah satu bapak bangsa Indonesia yang dapat menjadi tauladan bagi masyarakat Indonesia lain di zamannya maupun di zaman sesudahnya. Sutan Sjahrir berupaya membentuk suatu masyarakat Indonesia baru yang beradab tinggi, yang maju dalam hal ekonomi, yang dewasa berpolitik, berilmu maupun berteknologi. Negara berdasarkan sosialisme yang menghidupi demokrasi dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, kebebasan dan kesejahteraan.

Pemikiran Sutan Sjahrir yang mendamba manusia Indonesia yang beradab tinggi dirasa perlu untuk dikaji kembali. Relevansi pemikiran Sutan Sjahrir dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan di masa sekarang. Pemikirannya tentang demokrasi Indonesia misalnya yang banyak dituangkan oleh Sutan Sjahrir dalam tulisan. Tulisan tersebut perlu di kaji untuk memberikan gambaran yang jelas tentang demokrasi menurut Sutan Sjahrir.

Pemikiran seseorang tidak dapat dipisahkan dari beberapa faktor seperti lingkungan sosial, budaya, pendidikan bahkan keadaan yang sedang atau pernah dialami. Keadaan tersebut akan membentuk watak seseorang untuk berperilaku sesuai apa yang disosialisasikan. Begitu pula dengan pemikiran pada diri Sutan Sjahrir muncul dari beberapa faktor lingkungan sosial-budaya, pendidikan dan keadaan yang sudah dialami.

4.1 Lingkungan Sosial-Budaya

Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Sutan Sjahrir lahir ketika bangsanya mulai bergejolak pada masa awal pergerakan nasional. Setahun sebelumnya didirikan organisasi Boedi Oetomo dengan maksud menghimpun sumbangan dana bagi pelajar pribumi yang sedang kesulitan ekonomi untuk melanjutkan sekolahnya. Boedi Oetomo lahir dari para pemuda yang dapat belajar di sekolah buatan Belanda hasil kebijakan politik etis di Hindia Belanda. Pada awal abad ke 20 pemerintah Belanda telah memberlakukan politik etis di Hindia Belanda dengan tujuan awal sebagai politik “balas budi” bagi pribumi serta untuk memberi jalan keluar lain bagi Belanda menuju masa depan yang lebih baik bagi penjajahan di Jawa (Niel, 1984 : 21-22).

Penjajahan menciptakan sekat yang jelas antara penjajah dan yang dijajah. Sehingga nampak jelas penindasan dan penggolongan kelas sosial yang dilakukan oleh penjajah. Pembatasan pergaulan yang diterapkan kepada masyarakat pribumi merupakan salah satu ciri sosial dalam masyarakat jajahan. Sehingga muncul kelas-kelas sosial di masyarakat Hindia Belanda seperti golongan Eropa, golongan Asia pendatang yang mayoritas adalah pedagang Cina dan Arab, golongan Indo-Eropa, dan pribumi. Bahkan dalam pembagian strata sosial pribumi masih dibagi lagi menjadi dua golongan besar (Niel, 1984 : 30). Golongan pribumi tersebut adalah rakyat jelata yang mayoritas terdiri dari petani, orang desa dan kampung serta golongan priyayi atau bangsawan yang bekerja sebagai administratur dan pegawai pemerintah.

Sutan Sjahrir dilahirkan dalam golongan bangsawan dari kedua orang tuanya (Anwar, 2011 : 9-10). Ibunya bernama Siti Rabiah berasal dari Natal, Tapanuli Selatan dengan sebutan Putri Siti Rabiah, dalam garis ibunya masih keturunan langsung dari Tuanku Besar, orang terkemuka di Tapanuli Selatan (Mrazek, 1996 : 4). Ayah Sutan Sjahrir bernama Mohammad Rasad gelar Maharaja Soetan yang lahir di Kota Gedang Minangkabau.

Budaya Minangkabau masih erat dipegang oleh kedua orang tua Sutan Sjahrir. Suku bangsa Minangkabau menganut garis keturunan ibu (Iskandar dkk, 1998 : 14). Artinya keturunan ditarik berdasarkan garis ibu. Demikian pula dalam

hal pembagian harta di lihat berdasarkan pertalian dari pihak ibu. Sedangkan umumnya laki-laki yang sudah dewasa dianjurkan untuk pergi merantau. Hal ini berdasarkan pada adat yang telah turun temurun ada pada masyarakat Minangkabau. Garis keturunan ibu membuat perempuan Minangkabau bergerak secara statis di dalam adat. Sedangkan lelaki di luar sistem tersebut bergerak secara bebas untuk pergi merantau mencari penghidupan dan harta yang dapat di turunkan kepada anak cucunya kelak.

Sudah menjadi tradisi di Minangkabau bahwa laki-laki harus merantau ke luar dengan apa yang mereka sebut rantau. Dasar filosofis orang Minangkabau mengenai rantau adalah dimana bumi dipijak, disanalah langit di junjung (Iskandar dkk, 1998 : 15). Artinya dimana tempat mereka merantau diibaratkan sebagai kampung halaman sendiri. Suku Minangkabau berusaha membaaur dan memahami adat setempat sehingga terjadilah proses akulturasi budaya dalam dirinya. Sewaktu mereka kembali ke kampung halaman dari rantau nilai-nilai baik yang di dapat semasa merantau diterapkan demi kemajuan daerahnya. Ada kecenderungan Sutan Sjahrir juga menerapkan kemampuan adaptasinya di rantau. Pergaulan dan pendidikan yang diterima Sutan Sjahrir juga coba di terapkan di Indonesia.

Putri Siti Rabiah adalah istri ke dua dari Mohammad Rasad dari pernikahan sebelumnya dengan Kiam di Kota Gedang sesuai adat tanah kelahiran ayahnya. Pada umumnya, laki-laki Minangkabau biasanya hanya mengunjungi isteri dan anaknya pada malam hari (Bachtiar dalam Koentjaraningrat, 1984 : 230). Maka tidak banyak kesempatan bagi Mohammad Rasad untuk berkumpul bersama keluarga. Pendidikan keluarga sepenuhnya merupakan tanggung jawab Rabiah sebagai ibu. Ibu dalam keluarga menjalankan fungsi sebagai pengatur dan penguat keluarga. Terkadang ibu dapat memaksakan norma yang diharapkan untuk dipatuhi oleh keluarga. Termasuk jika terjadi perselisihan dalam keluarga maka ibu dapat memecahkan masalah tersebut melalui mupakat atau mencari persetujuan dengan suara bulat (Bachtiar dalam Koentjaraningrat, 1984 : 231). Salah satu ciri demokrasi yang diterapkan oleh orang Minangkabau ini tentu diajarkan oleh orang tua Sutan Sjahrir dalam menyelesaikan masalah di keluarga.

Meskipun tidak secara murni mengatur keluarga berdasarkan adat Minangkabau dalam rumah gadang, Rabiah masih menerapkan norma-norma Minangkabau. Pendidikan keluarga yang diperoleh Sutan Sjahrir juga merupakan hasil dari didikan Rabiah. Rabiah dikenal oleh keluarganya sebagai wanita yang teguh dan berpendidikan (Mrazek, 1996 : 6). Rabiah senang menceritakan “Kisah Seribu Satu Malam”, komedi stanbul, bermain musik, buku roman Jerman, namun tradisi dan sifat materilineal dengan memberikan gelar pada putra-putrinya tidak dilupakan. Seperti Soetan bagi anak laki-laki dan Siti bagi anak perempuan. Rabiah juga memegang teguh pula tradisi islam dalam mengatur keluarganya. Menurut suku Minangkabau antara adat dan Islam saling mengisi sehingga adat pada dasarnya bersendi kitabullah dan syarak, menjadi hukum serta adat yang harus dilaksanakan (Iskandar dkk, 1998 : 13).

Mohammad Rasad berkerja sebagai jaksa seorang pegawai pemerintah Belanda. Kakek Sutan Sjahrir merupakan jaksa pegawai pemerintah Belanda, nampaknya sudah menjadi tradisi bagi kaum pria dalam keluarga Sutan Sjahrir untuk menjadi jaksa (Mrazek, 1996 : 18). Keluarga Mohammad Rasad lebih memilih rumah bergaya Eropa karena tuntutan pekerjaan. Rumah Sutan Sjahrir sering dikunjungi teman-teman ayahnya dari Eropa dan pribumi. Sehingga tidak memungkinkan untuk jaksa pegawai Belanda tinggal di rumah adat yang dihuni oleh keluarga besar.

Adat minangkabau terkait erat dengan budaya asli dan pengaruh agama islam. Bahkan pengaruh agama islam membawa perubahan secara fundamental terhadap adat minangkabau. Agama islam melengkapi yang kurang, membenarkan yang salah , mengulas yang singkat, mengurangi yang berlebih, sehingga adat minangkabau tidak menyimpang dari kebenaran sejati dan adat yang seperti itulah yang dijalankan.

Selain adat mengenai rantau dan musyawarah, adat minangkabau diajarkan pula di surau sebagai tempat pendidikan agama bagi para pemuda minang. Surau merupakan tempat yang pada awalnya merupakan tempat berkumpulnya pemuda di malam hari. Sejak masuknya islam, surau digunakan sebagai tempat mengajarkan ilmu agama dan didirikan oleh guru agama islam. Sutan Sjahrir

setelah sekolah formal dipagi hari, menerima pendidikan agama di sore hari (Mrazek, 1996 : 60-62). Pendidikan Islam Minangkabau pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yakni pengajian Al-quran dan pengajian kitab. Selain mengajarkan membaca Al-quran diajarkan pula cara sembahyang, keimanan, sifat tuhan, dan pelajaran akhlak (Safwan dan Kutoyo, 1980 : 58).

Sutan Sjahrir merupakan anak yang dididik secara adat Minangkabau dari kedua orang tuanya. Gaya hidup Eropa dikenal Sutan Sjahrir sejak kecil dari tempatnya tinggal dan perkenalan ayahnya dengan orang-orang Eropa. Ibunya banyak mengajarkan Sutan Sjahrir tentang adat Minangkabau melalui norma dan agama. Lingkungan sosial budaya sedikit banyak mempengaruhi pemikirannya tentang demokrasi. Mupakat adalah cara orang Minangkabau untuk mengambil keputusan dengan suara bulat, menghindari kekerasan dan menyelesaikan masalah dengan adil. Pedoman kehidupan orang Minangkabau berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah adalah suatu bentuk keadilan yang juga diajarkan pada Sutan Sjahrir. Sehingga kemanusiaanlah yang diutamakan tanpa adanya penindasan bagi orang lain. Cara berfikir orang Minangkabau untuk beradaptasi menerapkan norma di lingkungan barunya juga diserap oleh Sutan Sjahrir untuk membentuk demokrasi yang diharapkan dapat memperbaiki kehidupan bangsanya. Selain faktor lingkungan sosial budaya tersebut ada pula faktor lain seperti lingkungan pendidikan dan politik yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

4.2 Lingkungan Pendidikan

Pendidikan merupakan alat untuk mensosialisasikan budaya kepada masyarakat. Budaya masyarakat diajarkan di sekolah agar peserta didik dapat diterima masyarakat. Pemerintah Belanda pada masa penjajahan menerapkan gaya pendidikan barat pada sekolah yang didirikan. Penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar serta kurikulum yang disamakan diterapkan di Indonesia. Pendidikan yang diterima oleh anak-anak Eropa, Cina, Arab dan sebagian pribumi merupakan bagian dari politik etis. Politik etis mengusahakan pembangunan tanah jajahan menggunakan modal swasta serta meningkatkan kemakmuran melalui edukasi dan kesejahteraan serta memperluas otonomi (Niel, 1984 : 21-22)

Politik etis dalam penerapannya digunakan untuk kepentingan pemerintah Belanda semata. Sistem ini digunakan untuk mendapatkan kemudahan bagi Belanda untuk mengeksploitasi Indonesia. Pendidikan pribumi tetap merupakan penindasan karena hanya anak golongan bangsawan yang dapat masuk sekolah. Orang tua berpendapat sekolah tidak dapat menjadi alat mobilitas sosial. Banyak sekolah yang didirikan hanya untuk mencetak pegawai kelas bawah. Motivasi anak yang beragam menjadi alasan banyaknya anak yang absen ketika masa sekolah. Selain itu, anak golongan bangsawan tetap menjadi anak yang bodoh dan nilai anak kulit putih tidak boleh lebih buruk dari pribumi.

Di pulau Sumatera sejak tahun 1900-an banyak didirikan sekolah bergaya Belanda dan bahkan permintaan untuk mendirikan sekolah semakin meningkat setiap tahunnya. Sutan Sjahrir mulai menerima pendidikan bergaya barat ketika pertama kali masuk *Europeesche Lagere School* (ELS) di Medan. Sekolah rendah Eropa pertama yang dimasuki Sutan Sjahrir karena ayahnya seorang jaksa pemerintah Belanda. Sekolah di negeri Belanda menjadi standart bagi sekolah rendah maupun menengah di Indonesia (Nasution, 1995 : 91). Sesekali pelajar ELS menggunakan celana dan jas serta berkumpul dengan golongannya dalam peringatan hari-hari besar. Setelah lulus dari ELS Sutan Sjahrir bersekolah di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Medan.

Medan pada tahun 1900-an disebut sebagai kota teladan dari kemajuan. Medan merupakan kota yang dapat dijadikan model bagi wilayah baru kolonial Belanda setelah kota besar lainnya seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya (Mrazek 1996 : 49). Arsitektur rumah, sekolah dan perkantoran di Medan dirancang sebagaimana gaya Eropa. Selama tinggal di Medan Sutan Sjahrir pada malam hari pergi ke Hotel de Boer untuk bekerja sebagai musisi. Sepulang sekolah dari ELS, Sutan Sjahrir pergi mengaji untuk mendapat ilmu agama di seberang sekolahnya (Mrazek, 1996 : 41). Pendidikan gaya Eropa di dapat Sutan Sjahrir melalui sekolah, ilmu agama di dapatnya dari mengaji serta budaya Eropa banyak didapat dari kehidupannya sehari-hari selama di Medan.

Setelah lulus dari MULO di Medan pada tahun 1926 Sutan Sjahrir mulai bersekolah di Bandung,. Suasana kebudayaan di Bandung tidak jauh berbeda

dengan Medan. Tata letak kota Bandung juga hampir mirip dengan keadaan di Medan, hal ini berdasarkan seluruh kota besar di Hindia Belanda di tata sesuai dengan gaya Eropa. Jarak kota Bandung dan pusat pemerintahan Belanda di Indonesia hanya berjarak lima jam perjalanan menggunakan kereta api. Namun, Bandung lebih termarginalkan daripada kota Batavia yang merupakan pusat pemerintahan. Bandung memiliki banyak sekolah serta beberapa termasuk terkemuka di Hindia. Gedung-gedung sudah mulai modern meskipun bergaya eropa klasik. Gedung fungsional pemerintahan juga banyak berdiri di Bandung. Selain segi arsitektur, gedung-gedung penyokong kesenian di Bandung juga banyak ditemukan seperti orkestra simponi dan perusahaan bioskop. Gedung kesenian tersebut dapat digunakan untuk pertunjukan teater, konser, pameran , pemutaran film dan pertemuan yang digunakan oleh siswa di Bandung (Mrazek, 1996 : 56-57).

Sutan Sjahrir merantau untuk bersekolah di Bandung. Merantau merupakan adat pemuda Minangkabau yang harus dilakukan. Sebelum para pemuda pergi merantau, mereka dibekali dengan beberapa macam pengetahuan yang dapat dijadikan modal hidup. Pengetahuan yang diberikan meliputi adat Minangkabau secara lisan oleh mamaknya seperti seluk beluk adat, cara hidup, cara berdagang, memburuh dan sebagainya. Pemberian pengetahuan sudah merupakan kewajiban bagi seorang ibu dengan tujuan kepergian pemuda untuk merantau atas pengetahuan mamaknya. Pemberian pengetahuan diharapkan agar pemuda tidak terlantar di rantau (Martamin, 1997 : 29). Modal Sutan Sjahrir untuk merantau telah di dapat dari Ibunya dengan diajarkannya adat Minangkabau kepada Sutan Sjahrir. Ayahnya membekali Sutan Sjahrir dengan jalan pendidikan menuju pegawai pemerintah Belanda. Sejak awal pendidikan Sutan Sjahrir di ELS merupakan sekolah yang bertujuan untuk mencetak pegawai rendahan Belanda. MULO sekolah lanjutan Sutan Sjahrir merupakan sekolah lanjutan yang disarankan setelah lulus ELS.

Algemene Middelbare School (AMS) Bandung merupakan sekolah selanjutnya dari Sutan Sjahrir setelah lulus dari MULO Medan. AMS Bandung merupakan sekolah yang didirikan pada tahun 1920 dengan orientasi utamanya

studi klasik Barat. AMS pada mulanya hanya dapat melanjutkan pelajarannya pada Universitas di Belanda. Maka pendidikan AMS berorientasi pada pendidikan di Belanda dan tidak dapat disesuaikan dengan keadaan di Indonesia (Nasution, 1994 : 139). Kurikulum AMS terdiri atas mata pelajaran umum yaitu bahasa Belanda, Melayu, Bahasa Inggris, Sejarah, Geografi, Undang-undang Negara, Matematika, Botani, Zoologi dan Pendidikan Jasmani. Namun tiap bagian AMS memiliki mata pelajaran khas sendiri seperti di Bandung yang merupakan AMS AII menambahkan mata pelajaran bahasa Latin.

Sutan Sjahrir selama sekolah di AMS tergabung dalam klub latihan debat *Patriae Scientiaeque*, tim sepakbola LUNO, klub teater Batovis dan pernah menjadi ketua perkumpulan Jong Indonesia cabang Bandung (Gambar 3). Sutan Sjahrir selama menjabat ketua organisasi banyak bertemu beberapa aktifis nasional kiri yang berdomisili di Bandung seperti Soekarno, Dr. Samsi, dr.Tjipto, dan Ir. Anwari (Hamdani dalam Anwar, 2010 : 92-93). Sutan Sjahrir mengadakan komunikasi dengan cabang Pemuda Indonesia di kota lain seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Medan, Padang dan kota lain untuk mempersatukan semua gerakan kedaerahan menjadi satu gerakan nasional (Gambar 4).

Jong Indonesia turut aktif pula dalam pemberantasan buta huruf dengan mendirikan sekolah-sekolah nasional Tjahja di beberapa tempat di Bandung dan *Volkuniversiteit* Tjahja di Regentsweg. Kurikulum pendidikan sekolah Tjahja disamakan dengan kurikulum AMS. Sekolah Tjahja mengajarkan bahasa asing, ekonomi, matematika, fisika, serta mata pelajaran lainnya. Guru yang mengajar di sekolah Tjahja adalah aktifis dari Jong Indonesia yang merupakan siswa AMS. Sekolah Tjahja mendanai pendidikannya melalui kegiatan koperasi sekolah, pementasan teater, perkumpulan serta swadaya masyarakat berupa makanan seadanya untuk disajikan kepada guru sebulan sekali. Aktifis Jong Indonesia kebanyakan adalah siswa AMS yang aktif dalam kelompok debat *Patriae Scientiaeque*, tim sepakbola LUNO, dan teater Batovis.

Kegiatan *Patriae Scientiaeque* dilaksanakan sebulan sekali untuk mengasah wacana anggotanya. Klub debat ini banyak menyinggung persoalan nasional yang sedang dihadapi. Terutama sikap feodalisme yang kuat dikalangan

pegawai Belanda dari kalangan pribumi. Banyak dari anggota *Patriae Scientiaequae* merupakan anak pegawai pemerintah sehingga ketika bersinggungan dengan feodalisme maka perdebatan sengit tidak dapat dihindarkan. Pertemuan yang bermuara pada muatan politis mungkin juga telah menghasilkan keputusan politis dalam *Patriae Scientiaequae*. Bahkan beberapa hasil diskusi dipentaskan pada teater Batovis. Sutan Sjahrir yang merupakan anggota juga kerap kali menengahi permasalahan dan semua yang hadir merasa puas dengan pendapatnya. Ada kecenderungan Sutan Sjahrir mencari jalan tengah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa menganak tirikan pokok persoalan yang dihadapi.

Teater Batovis dalam pementasannya banyak menyelipkan pesan moral pada penontonnya. Kritik terhadap pemerintah diselipkan dalam lakon yang dimainkan Batovis melalui tonil. Isi pementasan yang berusaha untuk membuka pikiran dan perhatian masyarakat tentang nasib suatu rakyat yang dijajah bangsa lain. Kata dan ucapan harus dengan sangat hati-hati dan bijaksana disusun sehingga memperoleh izin untuk dipertontonkan (Hamdani dalam Anwar, 2010 : 95).

Walaupun Jong Indonesia, *Patriae Scientiaequae* dan Teater Batovis tidak melaksanakan politik secara praktis, namun politik dijadikan kajian pembahasannya. Masalah yang paling banyak dibahas adalah feodalisme. Banyak diantara anggota dilarang aktif dalam kegiatan yang banyak mengkritik pemerintah itu. Tekanan yang diberikan oleh pemerintah Belanda terhadap orang tua anggota Jong Indonesia membuat anggotanya banyak yang tidak aktif. Hal ini dijadikan sasaran kritik Sutan Sjahrir terhadap kaum ningrat yang bersifat feodalistik. Sutan Sjahrir sejak di Bandung telah membuka pikirannya tentang penindasan dan feodalisme yang menyengsarakan rakyat. Sehingga dirasa perlu untuk mengakhiri penindasan tersebut. Sutan Sjahrir mendambakan kehidupan rakyat Indonesia yang merdeka tanpa penindasan dan berlandaskan kerakyatan. Namun, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyusun persatuan nasional yang nantinya akan menggerakkan sendi-sendi sosial di masyarakat agar tujuan demokrasi yang berdasarkan kerakyatan tercapai.

Sutan Sjahrir turut pula dalam Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada bulan Desember 1928 di Batavia. Jong Indonesie pada tahun 1927 merubah namanya menjadi pemuda Indonesia untuk memberikan semangat persatuan nasional. Beberapa teater tidak diberikan izin untuk digelar, banyak anggota Jong Indonesie semakin lama berkurang karena larangan dari orang tua mereka untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatannya. Sutan Sjahrir mulai sadar akan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan akan menjadi jembatan awal untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sendi-sendi feodalisme yang berorientasi pada kepentingan pribadi hanya akan menyengsarakan rakyat dan perlu diadakannya perubahan sosial di dalam masyarakat.

Lulus dari AMS di Bandung, Sutan Sjahrir melanjutkan pendidikannya di Belanda pada Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam. Sutan Sjahrir tidak mengalami kesusahan pada tahun-tahun awal ketika sampai di Belanda. Bahkan Sutan Sjahrir berkembang dalam iklim barat, karakternya menjadi matang dan tidak sedikitpun memiliki stereotip mentalitas oriental (Tas dalam Anwar, 2010 : 295). Hal ini membuktikan bahwa Sutan Sjahrir adalah seorang yang terbuka bagi banyak kalangan, memang sejak di Bandung Sutan Sjahrir banyak berteman dengan orang Belanda. Selain kuliah, Sutan Sjahrir juga dekat dengan anggota *Sociaal Democratische Students Club* seperti Salomon Tas. Sutan Sjahrir belajar sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, studi serta diskusi. Kelompok Salomon Tas adalah organisasi pemuda yang terikat longgar dengan Partai Buruh Demokrat Sosial Belanda yakni SDAP.

Standart hidup rakyat Indonesia yang begitu rendah membuat golongan nasionalis menginginkan kemerdekaan. Hal ini mendorong kaum nasionalis muda ke sayap kiri. Hubungan Sutan Sjahrir dengan SDAP dan Salomon Tas mengenalkannya pada sosialisme. Sutan Sjahrir mulai menunjukkan keinginan untuk lebih mempelajari teori sosialisme. Diskusi yang dilakukan dengan teman-teman Sutan Sjahrir dari kalangan mahasiswa Belanda dan Indonesia banyak membahas sosialisme. Teori sosialisme dipelajari Sutan Sjahrir dari buku-buku karangan hilferding, Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, Otto Bauer, Hendrik de Man, Marx dan Engels (Tas dalam Anwar, 2010 : 297).

Sutan Sjahrir pernah bekerja pada Federasi Buruh Angkatan Internasional dan terjun dalam politik. Selama bekerja di Serikat Buruh Sutan Sjahrir memahami pergerakan buruh sosialis Eropa tidak hanya suatu perjuangan tetapi juga suatu system organisasi yang bertujuan menghasilkan hasil praktis. Ketertarikan Sutan Sjahrir terhadap imperialisme di Indonesia membawa Sutan Sjahrir untuk mendalami mata kuliah hukum Hindia di Leiden. Sutan Sjahrir melakukan hal tersebut untuk mendalami sosialisme praktis. Selain itu, hubungan Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta membawanya masuk ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. PI pada awalnya bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang yang berasal dari Indonesia di negeri Belanda serta menjaga hubungan dengan orang Indonesia. Namun dalam perkembangannya kegiatan menjadi nasional-demokratis, non kooperasi dan meninggalkan sikap kerja sama dengan kaum penjajah, bahkan menjadi internasional dan anti-kolonial (Notosusanto, 2008 : 354-355). Sutan Sjahrir pada tahun 1930 terpilih menjadi sekretaris PI dengan Roesbandi sebagai ketua.

Perhimpunan Indonesia memiliki pengaruh di dalam negeri maupun diluar negeri. Perhimpunan Indonesia bukan hanya sebagai wakil pergerakan nasional Indonesia di luar negeri, tetapi juga sebagai pemberi ilham dari pergerakan nasional (Mrazek, 1996 : 116). Pada tanggal 29 Desember 1929 tokoh pergerakan nasional dari Partai Nasional Indonesia termasuk Soekarno ditangkap di Bandung. Setelah penangkapan Soekarno, gaya pergerakan nasional berubah. PNI pada tahun 1931 dibubarkan dan didirikan Partindo sebagai penggantinya. Terlebih Sartono sedang mempertimbangkan kerja sama yang lebih erat dengan Persatoean Bangsa Indonesia yang baru didirikan oleh Dr. Soetomo dan beranggotakan orang Jawa dan bersikap kejawaan. Partindo yang didirikan Sartono berdiri di atas dasar nasionalisme Indonesia, *Self Help*, dan tujuannya adalah kemerdekaan Indonesia. Golongan yang tidak setuju dengan pembubaran PNI menamakan dirinya golongan merdeka. Golongan merdeka berusaha untuk mendirikan suatu organisasi sendiri yaitu PNI-Baru (Notosusanto, 2008 : 375).

Sutan Sjahrir mulai menggunakan istilah Marxis secara bebas dan kuat, seperti landasan revolusi Indonesia seperti kaum tani, kaum buruh, pedagang kecil

dan kelas menengah yang miskin. Perjuangan kelas di Indonesia adalah perjuangan kemerdekaan. Hatta untuk perjuangan kemerdekaan menggunakan istilah daulat. Menurut bahasa arab, daulat berarti kebahagiaan dan kesejahteraan di bawah suatu kekuasaan yang berdaulat. Hatta terus mengembangkan konsep kedaulatan menjadi suatu konsep yang demokratis yaitu kedaulatan rakyat (rakyatlah yang harus berdaulat). Selama di Belanda Sutan Sjahrir juga mulai menggunakan istilah kedaulatan rakyat dalam perjuangannya (Mrazek, 1996 : 126).

Melalui lingkungan pendidikan, Sutan Sjahrir mendapat pemahaman tentang sosialisme dan pentingnya kedaulatan. Sutan Sjahrir mulai terjun di dunia perpolitikan di Indonesia ketika bergabung dengan Perhimpunan Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Pendidikan memberi Sutan Sjahrir dasar dari kehidupan bernegara yakni kerakyatan. Penindasan yang menyengsarakan rakyat harus segera dilenyapkan agar kedaulatan rakyat dapat dicapai. Sosialisme yang dipelajari Sutan Sjahrir selama di Belanda merupakan bekal ideologi mencapai demokrasi Sutan Sjahrir. Suasana politik di Indonesia juga memberikan kontribusi arah perjuangan dan kesadarannya dalam mencapai kedaulatan rakyat. Lingkungan politik yang mempengaruhi Sutan Sjahrir akan dibahas pada subbab berikutnya.

4.3 Lingkungan Politik

Karir politik Sutan Sjahrir dimulai ketika bergabung dengan Perhimpunan Indonesia yang diketuai oleh Moh. Hatta yang sedang belajar di Sekolah Tinggi Ekonomi di kota Rotterdam. Kedua orang yang sama-sama merantau tersebut segera menemukan kecocokan satu sama lain. Sutan Sjahrir bergabung dan terpilih sebagai sekretaris Perhimpunan Indonesia pada Februari 1930. Saat itu usia Sutan Sjahrir 21 tahun (Anwar, 2010: 37). Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tanggal 5 November 1908. Organisasi ini didirikan sebagai wadah perkumpulan mahasiswa yang ada di Belanda (*indiers*). Moh. Hatta dipilih sebagai ketua PI pada tahun 1925, masa jabatannya merupakan yang paling lama, karena ketua-ketua yang sebelumnya hanya menjabat satu tahun.

Sementara di Indonesia terjadi penangkapan terhadap Soekarno dan pemimpin - pemimpin PNI tanggal 29 Desember 1929. Pemimpin PNI dituduhan melanggar pasal 153 *bis* dan 169 mengenai penyebaran propaganda yang mungkin akan mengganggu ketertiban umum (Ingleson 1981 : 124). Penangkapan tersebut berpengaruh terhadap arah perjuangan bangsa Indonesia. Penangkapan pemimpin PNI banyak mendapat kritikan keras baik dari pers maupun *Volkskraad*. Pendapat yang sama diutarakan yakni pemerintah hendaknya memiliki kewajiban moral untuk menyelenggarakan proses pengadilan bukannya mengambil tindakan administratif.

Setelah jelas pemimpin PNI yang ditangkap akan ditahan sementara waktu, Anwari dan Sartono mengambil alih pimpinan Pengurus Pusat PNI tanggal 9 Januari 1930 (Ingleson, 1981 : 132). Instruksi kepada pengurus cabang dan para anggotanya adalah menghentikan kegiatan politik atas nama partai hingga keputusan selanjutnya diberikan. Instruksi ini menimbulkan kritik tajam dari Hatta dan anggota partai yang kecewa atas pimpinan partai. Banyak dari anggota menyerahkan kembali kartu anggota dan terkesan cuci tangan atas peristiwa penangkapan. Hatta melipatgandakan usaha jurnalistiknya untuk mendukung serta membangun keberanian gerakan nasionalis. Artikel Hatta yang terbit bulan Maret menekankan agar kaum nasionalis tidak berkecil hati karena penangkapan. Hatta menekankan dua hal penting yakni bahwa PNI adalah partai rakyat bukan partai pemimpin dan agar PNI tidak tinggal diam dalam menghadapi tekanan (Ingleson 1981 : 135-136).

Campur tangan pemerintah serta sikap diam PNI menumbuhkan rasa prihatin terhadap hilangnya momentum bagi gerakan menuju kemerdekaan. Instruksi Januari 1930 dalam pandangan Sartono adalah demi kepentingan jangka panjang partai. Setelah mendengar putusan dewan atas penangkapan Soekarno dan pemimpin PNI, Sartono melakukan diskusi dengan sejumlah pemimpin lain terutama Ali Sastroamidjojo. Sartono menarik kesimpulan dari hasil diskusinya, bahwa PNI adalah partai terlarang dan terdapat kemungkinan anggotanya bisa ditangkap bila mereka kembali melakukan kegiatan politik berdasarkan pasal 169 Kitab Hukum Pidana (Daradjadi 2014 : 72). Timbul gagasan untuk mengganti

PNI dengan partai baru yang asas dan tujuannya sama dengan PNI. Gagasan untuk membentuk partai baru dibicarakan dalam Kongres luar biasa tanggal 25 April 1931 dan menghasilkan keputusan PNI bubar (Daradjadi, 2014 : 74).

Sedangkan Moh. Hatta sejak tahun 1929 melepaskan jabatannya sebagai ketua PI dan digantikan oleh Abdullah Sjukur. Hatta menyadari bahwa di dalam tubuh PI banyak mendapat pengaruh dari kaum komunis, karena anggotanya kebanyakan orang dengan paham komunis. Semakin membesarnya pengaruh komunis tersebut di dalam tubuh PI, membuat Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir dikeluarkan dari organisasi pada tahun 1931. Mereka dianggap menentang Partindo dan akan membuat partai tandingan (Legge, 1992: 41-42).

Karir politik Sutan Sjahrir tidak berhenti begitu saja. Sementara Hatta menyelesaikan kuliah di Belanda, Sutan Sjahrir kembali ke Indonesia memimpin PNI-Baru dan mengurus surat kabar Daulat Rakyat (Gambar 2). Butuh waktu singkat bagi Sutan Sjahrir untuk mendapat perhatian orang banyak lewat tulisan-tulisan yang diterbitkan melalui surat kabar, hal tersebut membuat anggota-anggota partai mengakui kepemimpinan intelektualnya (Legge, 1992: 43). Sutan Sjahrir terpilih sebagai ketua Pimpinan Umum PNI - Baru dalam Kongres I di Bandung pada bulan Juni 1932. Pimpinan Sutan Sjahrir ditandai oleh pengarahannya konsolidasi ke dalam untuk menumbuhkan kematangan politik dan jiwa kritis. Pembubaran PNI mendapat kritik dari Sutan Sjahrir dalam Daulat Rakyat. Sutan Sjahrir berpendapat bahwa :

Pembubaran Partai Nasional Indonesia tidak dilakukan sepanjang semangat kerakyatan PNI, tidak sepanjang azas strategi PNI, menjadi tidak dilakukan oleh PNI. Perkataan pemimpin Partai Nasional Indonesia itu menyebut ; “overmacht” (keadaan memaksa) tidak lain berarti “onmacht” (tidak kemampuan) dari partai sendiri... Partai Indonesia boleh memakai maksud dan strijdprogram yang lama di statutenya, tetapi semangat dan perjanjiannya ini ada lain, lain dari semangat dan perjanjian Partai Nasional Indonesia.

(Sutan Sjahrir, 1947 : 10)

Pembubaran PNI tidak bersangkutan lagi dengan azas, semangat dan strategi PNI. PNI merupakan partai rakyat sehingga perjuangan partai dapat dilanjutkan.

Selain itu, bubarnya PNI merupakan tanda melemahnya perjuangan menuju kemerdekaan.

Namun, dilain pihak PNI-Baru dengan lamban namun pasti bergerak ke arah tujuan revolusiner. Gaya kepemimpinan Gubernur Jenderal de Jonge juga mendapat kritik dari PNI-Baru. Kritik diarahkan kepada Gubernur Jendral de Jonge yang tidak menginginkan debat terbuka dengan sifat politik. Pemberontakan yang terjadi tahun 1933 di atas kapal *Zeven Provinciën* dianggap ada kaitannya dengan kegiatan PNI-Baru. Sehingga perlu untuk memenjarakan orang-orang PNI-Baru. Ketegangan yang terjadi membuat pimpinan PNI-Baru mengeluarkan Instruksi umum no 2 yang mengharuskan cabang dan anggota lebih menekankan lagi pada pendidikan kader (Mrazek, 1981 : 198-200). Sikap diam PNI-Baru diartikan sebagai gerakan bawah tanah oleh Belanda. Sehingga pemimpin PNI-Baru dianggap berbahaya karena melakukan propaganda melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah *Daulat Rakjat* (Mangandaralam, 1987: 22-23).

Sebelum ditangkap, Sutan Sjahrir sempat menjadi pimpinan *Congres Kaum Buruh Indonesia (CKBI)* yang berpusat di Jogjakarta dan meletakkan jabatan pemimpin redaksi *Daulat Rakyat* (Mrazek, 1996 : 161). Sutan Sjahrir selama menjabat sebagai ketua CKBI, banyak berkonsentrasi pada masalah perburuhan. Sutan Sjahrir banyak menulis tentang perburuhan dalam *Serikat Sekerja*. Namun, CKBI setelah tahun 1933 tidak banyak melakukan aktifitas, hanya pada tahun yang sama melakukan kongres dengan hasil Sutan Sjahrir sebagai ketua. Setelah kongres tahun 1933 tidak terdengar lagi kegiatan yang dilakukan oleh CKBI. Selain kegiatannya di CKBI dan PNI-Baru, Sutan Sjahrir dianggap berbahaya bagi Belanda karena menginginkan Indonesia merdeka. Sehingga Sutan Sjahrir yang sebelumnya berencana akan melanjutkan kuliahnya di Belanda ditangkap tanggal 26 Februari 1934 setelah sehari sebelumnya pemimpin PNI-Baru yang lain ditangkap (Mrazek, 1981 : 201-202).

Sutan Sjahrir dipenjarakan dan dibuang ke beberapa tempat yakni penjara Cipinang, Boven Digul, dan Banda Neira. Sutan Sjahrir ditahan di penjara Cipinang selama sebelas bulan. Penjara diharapkan dapat merubah pikiran

seorang politikus pada masa itu untuk merubah sikapnya terhadap Belanda. Namun tidak bagi Sutan Sjahrir, keyakinannya bahwa penderitaan rakyat haruslah segera diakhiri. Kemerdekaan adalah jalan keluar untuk mencapai kedaulatan dalam segala bidang. Demokrasi yang berdasarkan kehendak masyarakat Indonesia tanpa ada kolonialisme dan imperialisme yang menjajah.

Sutan Sjahrir semakin merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyat selama di penjara. Hal ini membuat keyakinannya pada kemerdekaan semakin matang. Seperti yang dinyatakan Sutan Sjahrir kepada istrinya Maria di Belanda

...semua itu-pembusukan, penghancuran kebahagiaan pribadiku, jarak dari mereka yang paling dekat denganku- dituntut oleh rakyat. Semua kesedihanku sudah lenyap. Yang tersisa adalah perasaan menjadi bagian dari rakyat yang tertindas, dan perasaanku yang terikat dengan mereka.

(Sutan Sjahrir dalam Mrazek, 1996 : 216)

Pembuangannya selama di Boven Digul dan Banda Neira juga tidak banyak jauh berbeda dari pengalaman Sutan Sjahrir selama di penjara Cipinang. Hidup berdampingan dengan orang buangan lain membuat Sutan Sjahrir semakin merasakan pentingnya persatuan tanpa adanya pembedaan suku, ras, dan agama. Boven Digul adalah kamp yang diharapkan dapat merubah sikap orang-orang yang melawan pemerintah. Selama di Digul, Sutan Sjahrir banyak melakukan aktifitas fisik seperti jalan-jalan, berkunjung ke rumah interniran lain serta menulis surat kepada istrinya dengan tujuan menjaga akal sehatnya (Mrazek, 1996 : 252-254). Selain dibuang ke Digul, Sutan Sjahrir juga pernah dibuang ke Banda Neira bersama Hatta pada 10 Februari 1936 (Mangandaram 1987 : 33). Pulau kecil di selatan Ambon yang terdiri dari orang Belanda dan penduduk asli. Sutan Sjahrir banyak membedakan antara barat dan timur dalam pikirannya. Pendidikan filsafat Yunani klasik yang diterima Sutan Sjahrir selama di AMS banyak mempengaruhi pikirannya selama di Banda Neira. Sehingga Sutan Sjahrir banyak menulis tentang hakekat individu dalam perjuangan. Sutan Sjahrir semakin menyadari keinginannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Kehidupan politik Sutan Sjahrir memberikan kontribusi dalam pemikirannya tentang demokrasi. Pengalaman hidupnya bersama Hatta dalam Perhimpunan Indonesia maupun dalam pembuangan memberikan kesadaran akan

pentingnya kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mencapai kedaulatan baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Kedaulatan bagi rakyat untuk berpolitik, hidup dalam lingkungan yang damai tanpa tekanan dan mengembangkan ekonomi bagi kehidupannya. Salah satu bentuk demokrasi bagi Sutan Sjahrir berupa kedaulatan sebagai hasil pengalaman hidupnya bersama Hatta.



BAB 5. KONSEP DAN PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG DEMOKRASI

Pada bab ini akan dibahas mengenai bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi. Pemikiran Sutan Sjahrir seperti dijelaskan pada bab 4 tidak terlepas dari segala aspek kehidupan baik sosial budaya, pendidikan dan politik yang dialami Sutan Sjahrir. Demokrasi yang mendambakan kedaulatan tidak hanya dalam bidang politik saja namun juga ekonomi dan sosial.

Dalam kajian sejarah pemikiran, terdapat dua wilayah kajian di mana keduanya berusaha saling menjelaskan lingkungan sosial pencipta dan pemikiran yang tercipta. Begitu pula dalam konteks demokrasi Indonesia. Jika demokrasi Indonesia adalah sebuah pemikiran, maka hal ini berimplikasi pada keikutsertaan penjelasan ciri lingkungan sosial penciptannya.

Selain itu, agar penjelasan pemikiran menjadi bermakna maka diperlukan sebuah penjelasan teoritis. Kiranya simpulan yang bisa diambil bahwa untuk menjelaskan sebetulnya pemikiran diperlukan pendekatan teoritis untuk mencari konstruksi pikir sebuah pikiran sekaligus pertautan dengan pikiran sebelumnya, dan pendekatan sinkronis (latar sosial) dan diakronis (latar sejarah) untuk menjelaskan ciri sosial pencipta pikiran. Pemikiran Sutan Sjahrir sebagai bagian tak terpisahkan dari gerak dan pemikiran demokrasi Indonesia, hendaknya juga dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut.

Sutan Sjahrir selama masa pendidikannya di Hindia menemui banyak pembedaan antara kelas sosial, baik antara kaum penjajah dan yang terjajah. Namun, Sutan Sjahrir tetap berusaha untuk merangkul semua golongan dalam kelas sosial. Pendidikannya selama di Belanda memberikan pemahaman pada Sutan Sjahrir pentingnya kemerdekaan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Kedaulatan tanpa adanya penindasan atas hak-hak pribadi untuk menentukan nasib sendiri. Demokrasi dapat dicapai dengan jalan Indonesia harus merdeka terlebih dahulu. Untuk itu Sutan Sjahrir mau bekerja sama dengan golongan nasionalis dalam mencapai tujuannya.

Menciptakan masyarakat yang demokratis merupakan tujuan dari ideologi Sutan Sjahrir yaitu sosialisme-kerakyatan. Sosialisme yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Ideologi perjuangan yang memberi tujuan kepada Sutan Sjahrir untuk mencapai masyarakat yang demokratis. Selain sosialisme-kerakyatan, terdapat pula beberapa bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi. Berikut akan dibahas bentuk-bentuk pemikiran tersebut. Namun sebelum pembahasan tentang bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi akan diuraikan tentang demokrasi secara umum.

5.1 Konsep Tentang Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi secara harfiah maka dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang diperintah oleh rakyat. Kesimpulan dari pernyataan tersebut demokrasi merupakan sistem pemerintahan.

Secara umum demokrasi dalam implementasinya dibagi menjadi dua tipe yakni demokrasi langsung dan demokrasi representatif (Supriyadi, 2006 : 24). Demokrasi langsung berarti sistem pemerintahan dimana hak untuk melakukan pengambilan keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh badan warga negara. Demokrasi ini menuntut rakyat dapat merumuskan kepentingan bersama dan menemukan alternatif pemecahan masalah serta melaksanakannya secara bersama. Demokrasi langsung hanya dapat menyelesaikan masalah dalam komunitas kecil dalam lingkup regional maupun nasional demokrasi langsung hanya merupakan bagian dari keseluruhan proses pembuatan keputusan yang demokratis. Sedangkan demokrasi representatif merupakan sistem pemerintahan yang memungkinkan warga masyarakat dapat menjalankan hak yang sama dalam menjalankan pengambilan keputusan politik, namun bukan dalam kapasitas personal melainkan melalui perwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Dua elemen yang paling esensial dalam demokrasi representatif adalah dipisahkannya masyarakat dan pemerintah serta secara periodik diselenggarakan pemilihan umum sebagai wahana warga masyarakat mengontrol pemerintah.

Demokrasi representatif dikaitkan dengan dua sistem pemerintahan yang terkenal di dunia yakni demokrasi parlementer dan demokrasi presidensiil (Supriyadi, 2006 : 26). Demokrasi parlementer proses pengambilan keputusan dijalankan oleh wakil rakyat sesuai dengan hasil pemilihan umum, sehingga parlemen merupakan satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi untuk pengambilan keputusan. Lembaga eksekutif atau pemerintahan biasanya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Sedangkan demokrasi presidensiil kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki hak untuk membuat keputusan dan kekuasaan politik. Kekuasaan politik presiden seringkali disejajarkan dengan parlemen atau terkadang lebih kuat dari parlemen.

Jika dilihat dari segi aliran pikiran demokrasi dibagi menjadi dua kelompok yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi berdasarkan arti komunisme (Budiarjo, 2003 : 51). Ciri khas dari demokrasi konstitusional yakni pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi maka dari itu disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi. Gagasan untuk membatasi kekuasaan dirumuskan oleh Lord Acton dengan dalilnya manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Sedangkan demokrasi berdasarkan arti komunis memiliki arti bahwa demokrasi adalah untuk mayoritas rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum penghisap dan penindas dengan jalan menyingkirkan dari demokrasi. Asas dari demokrasi ini adalah gagasan monoisme yang menolak adanya golongan di dalam masyarakat, kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dalam mencapai komunisme, negara adalah alat untuk mencapai komunisme. Menurut istilah komunis demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi tersebut. Selain demokrasi rakyat, berkembang sebagai bentuk kerjasama antar negara maka disebut demokrasi nasional.

Dilihat dari segi hubungan antar alat perlengkapan negara maka demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan sistem pemisah kekuasaan dan demokrasi dengan sistem referendum (Joeniarto, 1990 : 68). Demokrasi dengan sistem parlementer dapat dilihat dari hubungan antara badan perwakilan dan badan yang menjalankan kekuasaan eksekutif dapat saling mempengaruhi. Badan eksekutif harus bertanggung jawab kepada badan perwakilan. Badan eksekutif merupakan pelaksana kebijakan pemerintah yang terdiri dari Perdana Menteri dan menteri-menteri yang disebut kabinet. Sedangkan badan perwakilan merupakan pencerminan suara rakyat yang biasa disebut Parlemen. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat, maka dari itu pelaksanaan pemerintahan merupakan tanggung jawab kabinet. Dikarenakan parlemen merupakan cerminan suara rakyat maka kabinet bertanggung jawab pada parlemen.

Demokrasi dengan sistem pemisah kekuasaan berarti badan eksekutif tidak bertanggung jawab pada parlemen. Antara kekuasaan parlemen dan eksekutif ada pemisahan yang utuh. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dibantu menteri yang merupakan pembantu presiden, oleh karena itu menteri yang bertanggung jawab pada presiden. Kekuasaan parlemen ialah dalam bidang legislatif. Apabila dikemudian hari legislatif dan eksekutif ada perselisihan maka badan yudikatif yang akan memutuskan perkara. Sedangkan demokrasi dengan sistem referendum merupakan sistem ketatanegaraan dimana badan eksekutif hanya menyelenggarakan kehendak parlemen. Sehingga dapat diartikan eksekutif adalah badan pekerja. Untuk mengadakan kontrol terhadap badan perwakilan maka dibentuk badan referendum yakni lembaga yang diadakan untuk memberikan kemungkinan kepada rakyat untuk mengontrol tindakan badan perwakilan dengan secara langsung oleh rakyatnya sendiri.

Dari penjelasan mengenai demokrasi diatas jika dilihat dari implementasinya demokrasi Sutan Sjahrir merupakan demokrasi representatif yang berciri demokrasi parlementer. Dilihat dari segi alam fikiran demokrasi Sutan Sjahrir adalah demokrasi konstitusional yang terbatas kekuasaannya. Jika

dilihat dari segi hubungan antar masing-masing alat perlengkapan negara demokrasi Sutan Sjahrir adalah demokrasi dengan sistem parlementer.

5.2 Demokrasi Dalam Pandangan Sutan Sjahrir

Sosialisme kerakyatan merupakan ideologi perjuangan bagi Sutan Sjahrir untuk memberikan arah dan tujuan mencapai kedaulatan rakyat. Jika dirunut, sosialisme bertujuan untuk mengurangi ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat melalui pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil. Cara melakukan pemerataan pendapatan nasional bagi kaum sosialis demokratis yakni melalui proses parlementer politik dan dengan mempertahankan kebebasan yang biasanya dianut dalam alam pikiran liberalisme.

Hubungan antara demokrasi dan sosialisme merupakan unsur yang paling penting dalam pemikiran dan politik sosialis. Melihat dari sejarahnya, gerakan-gerakan sosialis yang berhasil hanya tumbuh di negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat (Ebenstein 1994 : 293). Hal ini merupakan penggambaran dari pemerintahan demokrasi dan konstitusional yang umumnya diterima, kaum sosialis dapat memusatkan perhatian pada program khususnya. Tujuannya adalah membuat demokrasi lebih nyata dengan jalan memperluas penggunaan prinsip demokrasi dari lapangan politik ke lapangan non-politik pada masyarakat. Namun hal tersebut dapat dilakukan apabila negara yang dipimpin oleh kaum sosialis telah merdeka. Kemerdekaan bagi kaum sosialis harus direbut karena merupakan sendi-sendi demokrasi. Sebaliknya jika kemerdekaan belum diraih, demokrasi hanya sebagai suatu aspirasi, harapan dan ide yang harus direalisasikan (Ebenstein 1994 : 294).

Kaum sosialis dalam mencapai cita-citanya tidak memaksakan perubahan radikal dan menghancurkan sistem kapitalis melalui revolusi. Kaum sosialis cenderung untuk melaksanakan perubahan dengan menaati prosedur konstitusional melalui jalan parlementer. Hal tersebut juga mempengaruhi pikiran Sutan Sjahrir dalam mencapai kedaulatan rakyat. Namun begitu, konsep kerakyatan disesuaikan oleh Sutan Sjahrir terhadap kondisi dan latar belakang bangsa Indonesia.

5.2.1 Sosialisme-Kerakyatan

Secara umum tafsiran sosialisme yang terkenal terdapat dua kelompok yang saling bertentangan. *Pertama* sosialisme yang merupakan tahap awal komunisme yang bertumpu pada ajaran Marxisme – Leninisme. *Kedua* adalah sosialisme demokratis. Perbedaan antara dua kelompok ini adalah Marxisme-Leninisme yakin bahwa cita-citanya hanya dapat dicapai dengan cara menghancurkan masyarakat lama melalui revolusi sedangkan sosialisme – demokratis melaksanakan cita-citanya melalui jalan evolusi, persuasi dan tanpa kekerasan. Marxisme-Leninisme berkembang di negara Eropa Timur yang struktur masyarakat dan ekonominya berlandaskan komunisme sedangkan Sosialisme demokratis tumbuh dan berkembang di negara eropa barat yang merupakan negara industri maju, ekonominya mengacu pada kapital. Namun secara umum, sosialisme berusaha untuk meniadakan atau mengurangi ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat melalui pemerataan pendapatan nasional yang merata (Budiarjo, 1984 : 5-6)

Penganut sosialisme demokratis cenderung tidak memaksakan perubahan secara radikal dan menghancurkan sistem kapitalis secara revolusi. Sosialisme demokratis cenderung melaksanakan pembaharuan dengan menaati prosedur konstitusional melalui jalan parlementer, menjunjung tinggi hak-hak asasi dan pemilihan umum yang demokratis hal tersebut senada dengan tinjauan buku isme-ismedewasa ini. Sutan Sjahrirpun merupakan penganut sosialisme seperti yang dinyatakan dalam tulisannya :

Sosialisme itu adalah suatu dunia pikiran, suatu aliran internasional yang disandarkan pada teori hendak memerdekakan kaum buruh, yaitu golongan yang dipengaruhi oleh stelsel kapitalisme...dalam pergaulan hidup yang dikehendaki kaum sosialis, pada mana segala alat-alat adalah kepunyaan bersama, pembagian dari penghasilanpun akan dilakukan secara adil.

(Sutan Sjahrir, 1947 : 64-65)

Hal ini juga dikuatkan dalam tulisan Sutan Sjahrir yang lain :

Bagi kita sosialisme adalah suatu cara memperjuangkan kemerdekaan dan kedewasaan manusia, yaitu bebas dari penindasan dan penghisapan serta penghinaan oleh manusia terhadap manusia.

(Sutan Sjahrir 1982 : 84)

Sutan Sjahrir merupakan seorang penganut sosialisme dalam kelompok sosialisme demokratis. Sehingga jalan perjuangan Sutan Sjahrir sedikit terpengaruh oleh cara-cara perjuangan kaum sosialisisme demokratis di Eropa Barat. Sutan Sjahrir terpengaruh cara perjuangan sosialisme ketika belajar di Belanda (lihat bab 4).

Sutan Sjahrir tidak serta merta menerapkan sosialisme demokratis di Indonesia. Sosialisme perlu disesuaikan lagi dengan keadaan dan kondisi di Indonesia. Sosialisme ala Sutan Sjahrir berpijak kepada penghormatan nilai-nilai demokrasi dan humanisme (Anwar 2011 : 102). Menghargai dan mengutamakan kemerdekaan individu-individu masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, Sutan Sjahrir berpendapat bahwa Revolusi Indonesia hendaknya melebarkan sayap jauh melampaui batas-batas kemerdekaan nasional untuk menanamkan kemajuan sosial-ekonomi yang berakar luas. Pandangan humanismenya semakin terlihat ketika Sutan Sjahrir berkali-kali mengungkapkan kecemasannya mengenai bahaya-bahaya dari suatu masa depan otoriter bagi bangsa Indonesia baik itu otoritarianisme kanan yang diwakili oleh golongan yang segera mewarisi pemikiran feodal maupun otoritarianisme kiri yang diwakili oleh golongan komunis. Oleh Sutan Sjahrir, keduanya sama-sama mencerminkan penegasian individu rakyat Indonesia. Kesimpulan dari pernyataan di atas, Sutan Sjahrir menginginkan demokrasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Sosialisme Sutan Sjahrir lebih dikenal dengan Sosialisme Kerakyatan. Sosialisme ala Sutan Sjahrir memberikan kebebasan kepada individu terhadap nilai-nilai demokrasi dan humanisme. Namun sejarah menunjukkan, masalah kemerdekaan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Kemerdekaan memeluk agama-kepercayaan, mendirikan organisasi politik dan sebagainya merupakan sendi-sendi demokrasi. Jika prinsip demokrasi telah tertanam kuat dalam hati dan pikiran rakyat, maka kaum sosialis dapat memusatkan perhatian pada aspek lain begitu pula Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir berpendapat bahwa Indonesia harus mencapai jalan demokrasinya sendiri, seperti program yang diusulkan Sutan Sjahrir dalam tulisannya

...kemerdekaan nasional menurut sifat demokrasi :
pemerintahan yang dilakukan oleh dewan-dewan perwakilan.
selainnya misalnya mengadakan aksi tentang segala pengikatan

pers, berserekat dan berkumpul, menghapuskan hak-hak luar biasa pemerintah, persamaan diantara laki-laki dan perempuan, berusaha melenyapkan peraturan feodal... Berusaha supaya setiap orang mempunyai penghidupan minimum, pendapatan yang paling rendah guna memenuhi kehidupan sederhana...

(Sutan Sjahrir, 1947 : 49)

Untuk menjalankan cita-cita demokrasi, Sutan Sjahrir pertama harus mencapai kemerdekaan Indonesia. Menurut jalan sosialisme demokratis maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan evolusi. Yakni melakukan perubahan dalam aturan-aturan negara secara progresif tanpa kekerasan. Sutan Sjahrir berpendapat bahwa sosialisme berarti menghargai martabat manusia. Untuk tujuan tersebut maka dalam mencapai demokrasi Sutan Sjahrir mengembangkan konsep parlementer untuk bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan dengan adanya perwakilan-perwakilan rakyat yang duduk di parlemen maka sejatinya rakyat juga turut andil dalam negara. Kebijakan politik yang disuarakan oleh perwakilan rakyat maka akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial. Pernyataan diatas merupakan ciri dari demokrasi politik yang diharapkan Sutan Sjahrir.

Sutan Sjahrir sangat menitikberatkan pada upaya-upaya melakukan pendidikan untuk rakyat. Kolonialisme bisa bertahan lama di bumi pertiwi, karena kemiskinan dan kebodohan membuatnya semakin terperdaya. Usaha tersebut dilakukan Sutan Sjahrir dan golongan merdeka dalam PNI-Pendidikan. Mereka pada mulanya yakin bahwa pendidikan adalah jalan keluar dalam mengakhiri kolonialisme Belanda yang bercokol selama tiga ratus tahun karena kebodohan rakyat. Maka perlu diadakan pendidikan untuk mencerdaskan rakyat dan merubah negara sesuai keinginan mereka. Seperti yang ditegaskan Sutan Sjahrir

...(Rencana pendidikan secara massal ini adalah evolusioner, paralel dengan teori pendidikan kaum sosial demokrat. Dengan jalan pendidikan massal itu dan dengan jalan meyakinkan orang, mereka hendak memperbesar pengaruh mereka dan dengan bertambahnya pengaruh itu mereka mengharapkan bisa merubah bentuk-bentuk kenegaraan menurut keinginan mereka)

(Sutan Sjahrir, 1990 : 219)

Maka dari hal tersebut Sutan Sjahrir merumuskan sosialismenya adalah anti kolonialisme dan imperialisme, karena kolonialisme dan imperialisme mengekang pribadi dalam mengembangkan dirinya. Sehingga rakyat tidak memiliki

kebebasan berfikir dan berpendapat, padahal demokrasi haruslah mempertimbangkan hak-hak rakyat agar tidak terjadi penindasan dan ketimpangan sosial di dalamnya. Selain itu sosialisme kerakyatan juga dengan tegas menolak segala bentuk totalitarianisme. Baik totalitarianisme kanan dalam bentuk fasisme, maupun komunisme sebagai wujud totalitarianisme kiri. Keduanya mengekang kebebasan perorangan yang membuat manusia tidak lebih dari budak kekuasaan semata. Pernyataan di atas adalah ciri demokrasi sosial Sutan Sjahrir yang menekankan pada aspek mental rakyat agar terlepas dari mental feodal dan fasis yang menghambat dirinya untuk mengembangkan diri.

Begitu pula nasionalisme, menurut Sutan Sjahrir nasionalisme harus berpijak pada demokrasi, karena nasionalisme bisa tergelincir pada fasisme jika bersekutu dengan feodalisme lokal. Nasionalisme juga bisa menjadi chauvinistik dalam hubungan internasional, jika tidak dilandasi pemikiran humanistik (kemanusiaan). Sutan Sjahrir menekankan secara jelas tujuan dan strategi kaum sosialis berbeda dengan kaum komunis. Diktator Proletar sebagai sebuah tahapan revolusi bagi kaum komunis, untuk kaum sosialis merupakan bentuk kediktatoran yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Umumnya kaum sosial demokrat memang secara teoritis merevisi teori Marxist tentang diktatur proletariat sekalipun itu sebagai transisi untuk merubah masyarakat ke bentuk sosialisme (Budiarjo, 1984 : 34-35).

Ciri lain dari demokrasi Sutan Sjahrir adalah demokrasi ekonomi, namun dalam demokrasi ini perlu diadakannya sebuah kemerdekaan nasional. Kemerdekaan dibutuhkan agar negara memiliki hak untuk mengatur perekonomiannya sendiri tanpa ada campur tangan asing. Sosialisme ala Sutan Sjahrir merupakan suatu cara memperjuangkan kemerdekaan dan kedewasaan manusia, yaitu bebas dari penindasan serta penghinaan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Sosialisme kerakyatan mendasarkan sosialisme pada kesanggupan rakyat dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan sosialisme tersebut, melihat Indonesia sudah mempunyai negara dan pemerintahan sendiri. Sosialisme yang diperjuangkan oleh Sutan Sjahrir adalah musuh penindasan serta penghisapan rakyat. Pemikiran sosialisme Sutan Sjahrir ini didasarkan pada

kerakyatan. Kerakyatan yang dimaksud adalah sebagai pelengkap makna sosialisme yang berarti sebuah penghayatan bahwa sosialisme yang dipahami dalam sosialisme kerakyatan menjunjung tinggi azas persamaan derajat manusia. Seperti yang dinyatakan Sutan Sjahrir :

Bagi kita perkataan 'kerakyatan' sebagai pelengkap pengertian sosialisme kita, tidaklah lain dari suatu penghayatan dan penegasan bahwa sosialisme yang seperti kita pahami itu, selamanya berpegangan pada dan menjunjung tinggi dasar dan azas persamaan derajat manusia, sehingga kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa golongan kecil manusia boleh merasa dan berlaku sebagai golongan yang istimewa kedudukan serta haknya, asal saja mereka menanamkan dirinya Kaum Komunis Stalinis. Kita menolak pula ajaran yang membenarkan bahwa golongan kecil yang menganggap diri mereka paling berani dan paling pandai serta ahli dalam melaksanakan revolusi sosialis, mengangkat dirinya sendiri menjadi wali dari kaum buruh dan akhirnya wali dan penguasa dari seluruh manusia yang hidup dibawah kekuasaan dunia mereka

(Sutan Sjahrir, 1982 : 91)

Sosialisme yang dianut oleh Sutan Sjahrir dan menurutnya cocok untuk Indonesia adalah Sosialisme kerakyatan yang mengakui kemerdekaan setiap orang untuk berpikir dan bertindak. Sutan Sjahrir menekankan bahwa tujuan kaum sosialis dan komunis berbeda. Sutan Sjahrir menolak obscurantisme, yaitu pembatasan ilmu pengetahuan dan pemikiran, chauvisme dan diktator seperti yang terjadi di Cina dan Uni Soviet.

Kemerdekaan adalah syarat untuk mendapatkan kedaulatan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Demokrasi dalam bidang ekonomi dapat terlaksana apabila pemerintah telah berdaulat dalam bidang politik. Sehingga mampu menciptakan kebijakan yang adil baik perekonomian rakyat. Demokrasi dalam bidang sosial juga harus merubah mental masyarakat yang feodal menjadi masyarakat yang modern serta humanis. Hilangnya penghisapan dari manusia ke manusia lain, memberikan kebebasan berfikir dan bertindak kepada individu sebagai seorang warga negara. Sehingga tugas negara adalah sesuai dengan fungsinya, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Sosialisme Kerakyatan adalah ideologi yang memberikan dasar bagi Sutan Sjahrir untuk mencapai demokrasi ala Sutan Sjahrir yakni dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

5.2.2 Demokrasi Politik

Demokrasi politik di Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen tertuang dalam bab I pasal 1 ayat 2 yang berisi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” dipertegas pula pada bab II pasal 2 ayat 1: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang”. Pasal dalam undang-undang tersebut yang menjadi dasar demokrasi politik di Indonesia. Demokrasi politik yang ideal bagi Sutan Sjahrir adalah keadaan dimana masyarakat berada dalam tingkatan yang sama, terciptanya keadaan sosial bagi seluruh masyarakat baik dalam bentuk keamanan dan kesempatan untuk mengakses sumber kesejahteraan. Sehingga Sutan Sjahrir mengatakan bahwa hal tersebut dapat diwujudkan dengan jalan kerakyatan dan melalui lembaga parlementer yang merupakan perwakilan rakyat.

Menurut jalan pikiran ini sosialisme hendaknya sebagaimana yang dicita-citakan, merupakan suatu tingkatan dalam perkembangan masyarakat dimana telah diwujudkan keamanan pribadi yang sebesar-besarnya, keadilan sosial dan kesempatan yang sama buat setiap orang untuk hidup dan untuk berkembang. Bagaimana gambaran masyarakat yang demikian tidak dapat diramalkan sebelumnya. hal itu bagaimanapun juga harus dicapai dengan perubahan sebagian dan lagi pula dengan jalan kerakyatan dan jalan parlementer sebagaimana halnya dengan negara kemakmuran.

(Sutan Sjahrir 1982 : 14)

Mengutip pernyataan Sutan Sjahrir diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan parlementer merupakan jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Melalui parlemen rakyat dapat memberikan suaranya dalam pemerintahan. Sehingga kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyat dan dari rakyat benar-benar terpenuhi. Kebijakan politis yang diputuskan dalam parlemen diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Sehingga cita-cita kaum sosialis serta prinsip demokrasi dari lapangan politik dapat meluas ke lapangan non politik pada masyarakat.

Keadaan Indonesia yang belum merdeka adalah lahan perjuangan Sutan Sjahrir untuk mencapai demokrasi. Jalan demokrasi melalui parlementer belum

dapat dilakukan karena kemerdekaan yang merupakan prinsip demokrasi belum terpenuhi. Untuk itu Sutan Sjahrir mendukung pergerakan kaum nasionalis dalam mencapai kemerdekaan. Setelah merdeka, barulah syarat demokrasi tahap selanjutnya dilaksanakan yakni sistem pemerintahan parlementer. Kendati begitu perlu diadakan pula partai politik yang merupakan kendaraan politik untuk masuk dalam parlemen. Selain itu, fungsi partai politik adalah sebagai alat perjuangan mencapai demokrasi dalam artian yang sebenarnya. Keberadaan partai politik dapat menjadi mesin suara rakyat, dimana wakilnya dapat duduk di parlemen.

Ideologi sosialisme kerakyatan sejalan dengan tujuan sosialisme demokratis dalam mencapai tujuannya. Sutan Sjahrir mengamati dan menyadari bahwa ajaran Marx tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat eropa. Kaum buruh tidak berperan sebagai kelas revolusioner dan tidak mengalami proses pemiskinan. Kapitalisme tidak runtuh sebagaimana diramalkan oleh Marx, kapitalisme mampu mengadopsi buruh. Maka perjuangan kelas yang merupakan sendi ajaran Marx tidak lagi relevan atau mengena. Sosialisme tidak perlu dicapai dengan cara revolusi, tapi dengan cara demokratis. Marxisme bukan berhala yang dipuja dan wajib dilaksanakan secara kaku dan doktriner. Marxisme bisa dipakai sebagai alat analisa memahami perkembangan masyarakat. Dalam mempelajari Sosialisme, Sutan Sjahrir sudah dipengaruhi oleh aliran revisionisme yang mengkritik Marxisme. Sutan Sjahrir tidak anti-kapitalisme sepenuhnya, juga tidak bersimpati dengan ekonomi-komando yang dilaksanakan Uni Soviet dan kaum Leninisme-Stalinisme (Anwar, 2010: 111-113). Lebih lanjut Sutan Sjahrir sepakat dengan perjuangan parlementer dengan memperjuangkan hak-hak politik.

Mereka (kaum sosial demokrasi) yakin, bahwa perubahan masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis adalah suatu protes perkembangan yang juga merupakan kemenangan suara kaum sosialis didalam pemilihan-pemilihan untuk parlemen, serta tercapainya kekuasaan politik oleh kaum sosialis dengan jalan pemilihan tadi. Selanjutnya segala perubahan tentang kedudukan pemilihan produksi dapat diadakan dengan jalan parlementer. Oleh karena itu kaum sosialis parlementer sangat mementingkan semua syarat untuk memperoleh demokrasi parlementer yang sesempurna-sempurnanya.

(Sutan Sjahrir 1982 : 43)

Sutan Sjahrir memiliki harapan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, yakni berupa revolusi ke dalam dan keluar negeri. Keluar negeri berupa revolusi nasional, yakni bangsa Indonesia harus mengusahakan pengakuan internasional sebagai seluruh bangsa yang berdaulat. Sedangkan ke dalam berupa revolusi kerakyatan, yang berarti bangsa Indonesia berhadapan dengan feodalisme maupun fasisme. Oleh karena itu rakyat dalam perjuangan sebagai bangsa menuntut hak-hak kemanusiaannya, yang akan menjamin untuk tidak lagi diperlakukan sebagai budak. Gagasan revolusi Sutan Sjahrir baik ke dalam dan keluar dalam mencapai demokrasi banyak dicurahkan dalam tulisannya Perjuangan Kita.

5.2.3 Demokrasi Ekonomi

Walaupun tidak secara terus terang menyampaikan konsep demokrasi ekonomi, hal ini dapat diketahui melalui cara perjuangan dan tulisan Sutan Sjahrir. Kesimpulan dari tulisan maupun perjuangannya yakni kedaulatan dalam bidang politik adalah landasan utama untuk menjalankan demokrasi di bidang sosial dan ekonomi. Demokrasi ekonomi dan sosial Sutan Sjahrir berbeda pandangan dengan Hatta yang bertumpu pada religi dan kenyataan pada masyarakat desa pada umumnya yang feodal (Legge, 1993 : 54). Sutan Sjahrir beranggapan asas demokrasi ekonomi dan sosial berakar dalam pemikiran politik Eropa serta kecenderungan kehidupan sosial masyarakat feodal yang menghambat perkembangan demokrasi dan mendorong otoriterisme.

Kemelut politik di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan adalah tugas utama yang harus diselesaikan Sutan Sjahrir sehingga demokrasi di bidang ekonomi dan sosial belum tersentuh. Namun bukan berarti Sutan Sjahrir melupakan bidang ekonomi dan sosial. Demokrasi politik, ekonomi, dan sosial harus berjalan beriringan dan merupakan kesadaran dan keinginan rakyat seperti yang dinyatakan Sutan Sjahrir:

Kita menghendaki kesediaan serta kegembiraannya untuk mengubah kehidupannya sendiri, mengubah masyarakat yang kolot dan kuno serta lapuk ini menjadi suatu masyarakat yang luas dan lapang bagi tiap orang yang hidup di dalamnya. Kita hendak bekerja atas dasar kemerdekaan jiwa orang, atas dasar kerakyatan, atas dasar suka rela, mufakat dan kerjasama, dan tidak dengan paksaan seperti yang telah dilakukan di negeri totaliter dan

diktatur... memahamkan kemajuan dan perobahan masyarakat kita secara kerakyatan oleh karenanya sama dengan mencari keseimbangan antara pengaruh dan peranan negara dalam lapangan ekonomi di dalam masyarakat dengan kegiatan partikulir di dalam lapangan itu. kegiatan dalam ekonomi itu haruslah dapat menambah, sedikitnya memudahkan inisiatip rakyat banyak dalam masyarakat, dan bukan sebaliknya...
(Sutan Sjahrir, 1982 : 271)

Sutan Sjahrir dalam demokrasi ekonomi menekankan beberapa aspek penting. *Pertama*, pembangunan adalah urusan negara, masyarakat dan manusia. Kemerdekaan politik yang merupakan jembatan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur haruslah menjadi cita-cita akan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat. Untuk mencapai cita-cita negara, pembangunan masyarakat tidak hanya diharapkan dari ekonomi saja, melainkan dari manusianya. Sikap dan jiwa manusia tidak hanya untuk membangun dan menciptakan alat-alat pekerjaan tetapi juga untuk membangun kesanggupan untuk bercita-cita. Dengan kata lain tidak hanya mendirikan bangunan dan alat kesejahteraan rakyat tetapi juga membangun jiwa kebangsaan dalam hal ini maka negara memiliki peranan untuk menjembatani.

Kedua, pentingnya ekonomi nasional dan kerjasama ekonomi internasional. Secara bertahap direncanakan untuk melakukan perubahan kedudukan modal asing yang harus dimulai dengan mengubah pengaruhnya atas kehidupan negara dan pemerintah. Kecenderungan pemerintah memandang produsen bumiputera adalah konsumen sehingga tugas pemerintah adalah agar barang yang dibeli tidak terlampau mahal. Sedangkan produsen dari semua produksi tersebut adalah pemodal asing. Sehingga perlu adanya kebijakan yang merencanakan dan merubah lapangan produksi bumiputera untuk mengelola sendiri bahan mentahnya. Pengurangan jumlah pemakaian modal asing secara berkala harus diimbangi dengan mengurangi keperluan yang dirasa tidak perlu atau dengan kata lain berhemat. Untuk itu diperlukan sikap dan kebijaksanaan negara dan pemerintah dalam menghemat dan menabung.

Selain itu, perlu diusahakan mendapatkan pasar untuk hasil dari usaha produksi bumiputera. Kebijakan dalam lapangan ekonomi yang ditujukan pada

pengendalian dan pemakaian hasil produksi masyarakat melalui perdagangan luar negeri, diharapkan menambah kekayaan negara dan memperkuat dasar kemakmuran. Negara dan pemerintah harus dapat mengendalikan lalu lintas perdagangan sehingga memperbesar kemungkinan penanaman modal dan membatasi konsumsi. Kebijakan negara dan pemerintah dalam mengendalikan perdagangan luar negeri harus merupakan bagian untuk mengusahakan kemakmuran serta pembangunan ekonomi nasional.

Ketiga, sifat dan jiwa masyarakat yang feodal dan boros perlu dirubah. Kegiatan penanaman modal dan kebijaksanaan ekonomi harus dibarengi dengan perubahan sifat masyarakat yang feodal dan boros. Kemerdekaan ternyata memperperbanyak jumlah tenaga pengangguran dan pemborosan pada administrasi pemerintah. Sehingga dengan banyaknya pegawai pemerintah mengakibatkan pemborosan untuk pengeluaran gaji. Sehingga perlu diadakan penataan serta jalan keluar terhadap hal ini. Kelebihan jiwa di pulau Jawa harus segera dipecahkan dengan jalan meluaskan lapangan pekerjaan. Untuk itu perlu membuka sumber-sumber kehidupan ekonomi yang baru.

Pemborosan masyarakat dalam arti pengeluaran dan pemakaian yang berlebihan tidak ada gunanya, hanya akan membuang harta negara. Sehingga perlu diadakan perubahan sosial dengan hidup hemat dan sederhana agar tercapai kemakmuran. Kesadaran inilah yang harus diperdalam diantara bangsa Indonesia yang menjadi suatu keyakinan pokok dan menjadi pedoman kehidupan. Hidup gampang dan serampangan harus segera hilang, dan segera dirubah hidup dengan tanggung jawab terhadap bangsa. Hidup dengan rencana, perhitungan dan tanggung jawab merupakan kewajiban manusia Indonesia sedangkan segala infrastruktur untuk mencapai hal tersebut harus dijembatani oleh pemerintah. Terbentuknya pola berfikir masyarakat berdasarkan sendi ekonomi diatas, perlu pula dibarengi dengan perubahan sosial masyarakat. Jiwa feodal dan boros harus dirubah dengan hemat dan menabung, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia demokrasi ekonomi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang berisi :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketiga ayat dalam pasal 33 juga terdapat dalam aspek penting demokrasi ekonomi Sutan Sjahrir yakni pembangunan merupakan urusan bersama negara dan masyarakat, dan ekonomi nasional. Setelah amandemen, pasal 33 diperkuat dengan ayat 4 yang berisi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sedangkan hubungan ekonomi dan sosial yang diharapkan Sutan Sjahrir adalah perubahan sifat dan jiwa masyarakat yang feodal dan kolot. Demokrasi sosial dapat dirubah dengan jalan revolusi yang akan di bahas pada sub bab selanjutnya.

Sebagai penjelasan akhir dari pandangan Sutan Sjahrir mengenai demokrasi ekonomi yaitu perlu adanya kerja yang beriringan antara bidang politik yang berciri pemerintahan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada sistem pemerintahan parlementer serta demokrasi ekonomi yaitu melalui adanya peranan negara dan pemerintah sebagai jembatan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Secara kongkret demokrasi ekonomi bersendi yakni pertama, pembangunan adalah urusan negara, masyarakat dan manusia. Kedua, pentingnya ekonomi nasional dan kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, sifat masyarakat yang feodal dan boros perlu dirubah. Semua itulah yang menjadi konstruksi pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi ekonomi ala Sutan Sjahrir di Indonesia.

5.2.4 Demokrasi Sosial

Demokrasi sosial di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 28A setelah amandemen yakni “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Namun sebelum amandemen, demokrasi sosial diatur dalam 28 yakni “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dalam Undang-Undang”. Sedangkan demokrasi sosial menurut Sutan Sjahrir dapat dilaksanakan dengan jalan revolusi. Revolusi untuk merubah sifat masyarakat yang feodal dan fasis. Demokrasi sosial Sutan Sjahrir tidak dapat dilepaskan dari masalah yang dihadapi negara pada saat mempertahankan kemerdekaan. Sehingga demokrasi sosial Sutan Sjahrir berciri perubahan sifat dan jiwa feodal ke arah jiwa nasional dan revolusioner. Revolusi menurut Sutan Sjahrir dapat dibagi menjadi dua yakni revolusi nasional/kemerdekaan dan revolusi sosial/kerakyatan. Sebagai seorang pemikir dari revolusi kerakyatan dan revolusi nasional, Sutan Sjahrir mempunyai pandangan mengenai taktik dan strategi perjuangan sendiri.

Demokrasi sosial Sutan Sjahrir tertuang dalam perjuangan kita yang merupakan sebuah diagnosa yang dirumuskan secara jernih tentang persoalan yang dihadapi Indonesia serta merupakan program menghadapi perjuangan fisik dengan Belanda. Sutan Sjahrir dalam tulisannya Perjuangan Kita, menegaskan bahwa perjuangan Republik Indonesia harus difokuskan menuju revolusi kerakyatan. Negara Republik Indonesia merdeka harus menjadi sarana, alat bagi perjuangan demokratis. Arah revolusi kerakyatan atau demokrasi ini adalah negara dengan penjaminan hak-hak dasar manusia, yakni: kebebasan berpikir, bicara, beragama, menulis, kelayakan upah, hak memperoleh pendidikan, dan hak politis. Revolusi Indonesia mesti merupakan revolusi sosial. Rakyat yang bergerak tidak hanya berhenti berjuang demi kedaulatan Indonesia, persatuan Indonesia, tetapi juga demi kemerdekaan rakyat dari segala penindasan, kemiskinan, kemalangan dan kesewenang-wenangan yang menjepit mereka.

Penjajahan oleh Belanda merupakan warisan feodalisme untuk menahan kemajuan sejarah bangsa. Feodalisme ini selanjutnya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia sehingga muncullah autokrasi dan fasisme penjajahan. Perjuangan

rakyat Indonesia dapat dikatakan merupakan perlawanan terhadap perkawinan feodalisme tersebut. Sehingga revolusi Indonesia memiliki corak revolusi sosial atau kerakyatan (Sutan Sjahrir 1945 : 20). Feodalisme yang telah mengakar pada bangsa Indonesia, juga berkawan dengan nasionalisme sehingga memunculkan solidarisme-feodal dan pada tahap selanjutnya menjadi fasisme (Sutan Sjahrir 1945 : 21). Untuk itu, revolusi Indonesia haruslah revolusi kerakyatan. Revolusi nasional hanyalah buntut dari revolusi kerakyatan.

Bukan nasionalisme harus nomor satu, akan tetapi demokrasi, meskipun kelihatannya lebih gampang, kalau orang banyak dihasut membenci bangsa asing saja. Memang benar bahwa cara demikian buat sementara berhasil. Akan tetapi untuk kemajuan masyarakat berbuat demikian tetap reaksioner dan bertentangan dengan kemajuan dunia, dan perjuangan sosial seluruh dunia, orang yang menganjurkannya tetap musuh rakyat, meskipun sedikit waktu didewakan rakyat seperti Hitler dan Mussolini.

(Sutan Sjahrir 1945 : 21-22)

Gambaran revolusi Indonesia ke luar dan ke dalam, harus dipimpin oleh golongan demokratis yang revolusioner dan bukan oleh golongan nasionalis yang fasis baik Belanda dan Jepang. Perjuangan demokrasi revolusioner dimulai dengan membersihkan diri dari fasis Jepang. Sutan Sjahrir merasa perlu memusuhi fasis dan kaki tangannya karena sudah berdosa dan berkhianat pada perjuangan revolusi rakyat. Revolusi Indonesia harus dijadikan alat perjuangan demokratis, dibersihkan dari sisa Jepang dan fasisnya. Undang-undang dasar demokratis yang memihak hak pokok rakyat untuk berfikir, berbicara, beragama, menulis, mendapat kehidupan, pendidikan, membentuk dan menentukan urusan negara dengan hak memilih dan dipilih.

Alat kekuasaan seperti pangrehpraja perlu didemokratiser sehingga mengecilkan jurang pertentangan rakyat. Sehingga, pemerintah memiliki alat yang dapat menjalankan revolusi. Revolusi yang bergerak dari tataran paling bawah pemerintah dapat dimulai melalui desa. Revolusi yang digagas Sutan Sjahrir bukanlah revolusi yang menimbulkan kebencian golongan berdasarkan atas kebangsaan. Namun, segala hukum dan hal penduduk diatur secara demokratis dengan semangat kemanusiaan dan kesosialan.

Jika dilihat dari budaya Indonesia yang mempunyai paham feodalisme, akan menjadi sangat rumit jika tidak benar dalam menghadapinya. Feodalisme dapat menghambat kemajuan suatu negara jika tidak benar menanganinya. Hal yang perlu dilakukan bukanlah menghilangkan sistem itu, tapi memberikan pemahaman terhadap sistem yang telah ada sangat lama tersebut. Maka, haruslah dijalankan suatu revolusi demokrasi yang bersifat revolusi kerakyatan. Revolusi harus dimulai dari garis bawah seperti petani dan kaum buruh, sampai kepada kaum pemuda dan tentara. Pemahaman-pemahaman kepada mereka untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, revolusi kerakyatan akan berhasil.

Berikut ini adalah revolusi kerakyatan pada kaum buruh, petani, pemuda, dan tentara menurut Sutan Sjahrir dalam Perjuangan Kita:

1. Kaum Buruh

Perjuangan yang dilakukan kaum buruh harus berdasarkan perjuangan internasional. Kaum buruh juga harus merubah solidaritasnya menjadi solidaritas internasional, bukan sekedar solidaritas kebangsaan saja. Sutan Sjahrir menginginkan para buruh bangsa Indonesia bercermin pada kaum buruh internasional. Perlu suatu ikatan yang mensejajarkan suara kaum buruh. Buruh juga harus menuntut hak kerakyatan berupa hak berbicara, menulis, berkumpul, rapat, mogok kerja, kepastian pencarian, keadaan kesehatan, pendidikan untuk anak, ketentuan gaji, dan lain sebagainya. Di dalam berjuang untuk kemerdekaan Indonesia kaum buruh sejalan harus berjuang untuk mendapatkan kedudukannya sendiri yang terkuat supaya sanggup menjadi pelopor didalam perjuangan menentang imperialisme di Indonesia dan memperkuat perjuangan kaum buruh Internasional.

2. Kaum Tani

Bagi kaum tani perjuangan kemerdekaan ini hanya akan berarti jika kemerdekaan dirasakan. Untuk itu, perlu diperhatikan pula nasib para petani di desa. Revolusi harus memberantas feodalisme yang berupa tuan tanah, aturan pemerintah feodal, pengerahan tenaga dan hasil tani

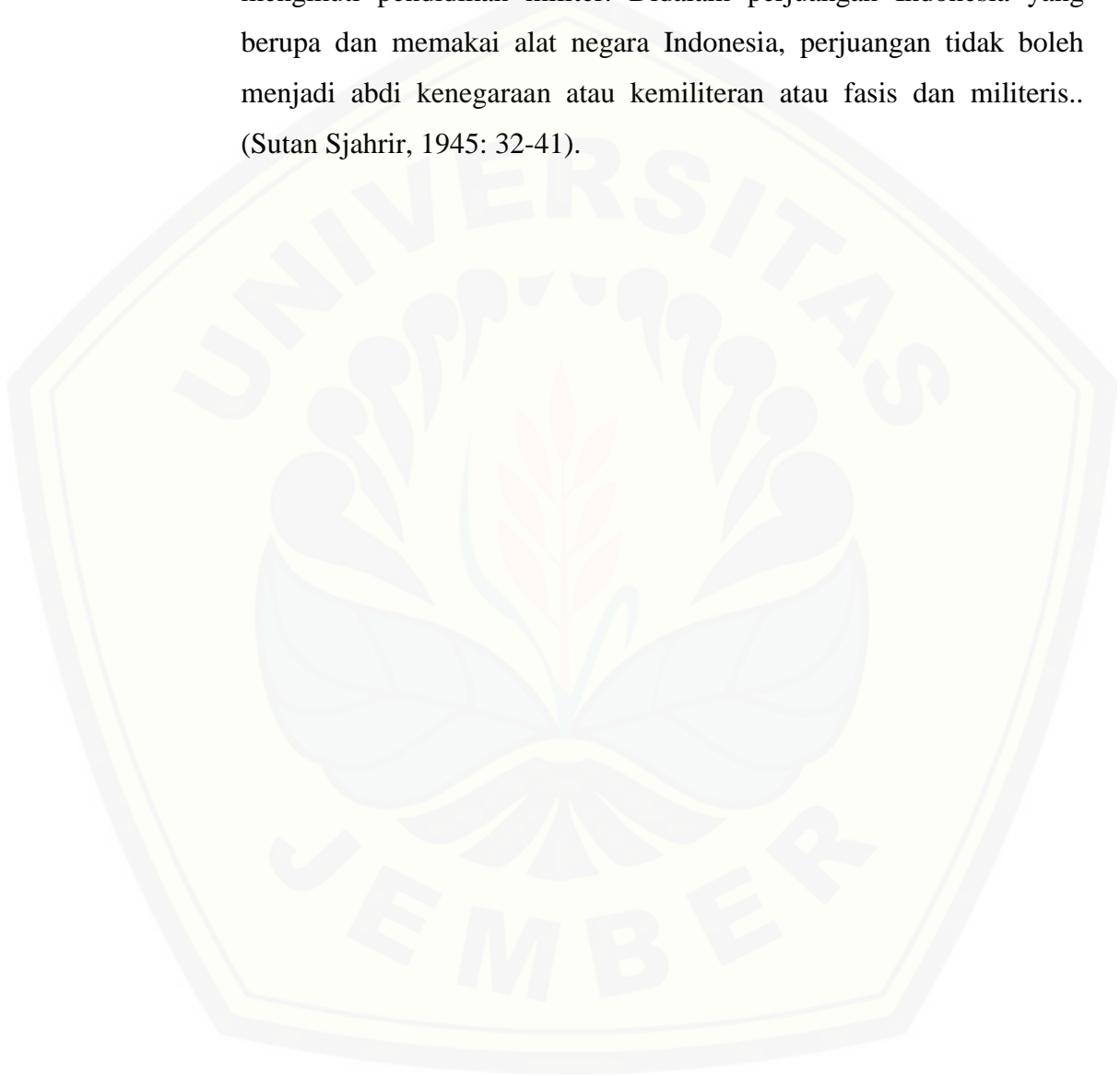
secara feodal seperti jaman Belanda. Masyarakat desa dapat membagi lebih rata ke kepulauan Indonesia dengan migrasi serta industrialisasi. Kelebihan jiwa yang telah dikurangi membuat desa menjadi lapang, sehingga perlu diadakan jalan usaha bersama yakni koperasi. Pemerintah di desa di sehatkan dengan melaksanakan kerakyatan yang sempurna dengan menggunakan kebiasaan lama, pemilihan, rapat desa, yang diberikan kekuasaan sepenuhnya dan ditambah kecerdasannya dengan mempertinggi pelajaran dan pendidikan di desa. Melalui pendidikan, desa dapat memperbaharui dasar masyarakat yang modern, membawa perubahan dan efisien. Selain itu perlu diadakan serikat tani untuk memudahkan urusan pertanian juga persatuan dan hubungan kaum buruh.

3. Pemuda

Dimasa perjuangan, pemuda hanya dilatih untuk bertarung saja. Untuk itu perlu merubah pandangannya, agar menjadi pemuda yang revolusioner. Semangat dan kekerasan hati pemuda harus menyadari bahwa kaum pemuda tak akan dapat menjalankan terus kewajibannya sebagai perintis jika tidak diisi dengan semangat kerakyatan dan kemasyarakatan. Pemuda harus menyadari yang akan dapat memenangi revolusi adalah rakyat banyak, kaum buruh, kaum tani dan kaum muda. Anggapan yang muda harus memimpin perjuangan kemerdekaan merupakan suatu kekeliruan yang dapat merusak perjuangan. Padahal yang harus memimpin revolusi merupakan pusat kekuasaan politik yakni partai kerakyatan yang revolusioner. Pemuda haruslah menjadi pemuda revolusioner yang mengahdapi dunia baru, pemuda yang bercita-cita dan mempunyai kesadaran serta pengertian yang jernih tentang perjuangan untuk rakyat serta kemanusiaan umumnya.

4. Tentara

Perlu membentuk susunan pertahanan untuk membela tanah air serta rakyat dengan susunan pertahanan yang selengkap-lengkapny. Tidak hanya dengan dibekali senjata yang modern, tetapi para tentara harus mengikuti pendidikan militer. Didalam perjuangan Indonesia yang berupa dan memakai alat negara Indonesia, perjuangan tidak boleh menjadi abdi kenegaraan atau kemiliteran atau fasis dan militeris.. (Sutan Sjahrir, 1945: 32-41).



BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan dalam bab 4, bab 5, dan bab 6 maka dapat ditarik kesimpulan serta sekaligus untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan pertama, kondisi lingkungan sosial-budaya, pendidikan dan politik mempengaruhi pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi. Kebijakan politik etis pada awal abad 19 menciptakan perbedaan sosial di masyarakat. Sutan Sjahrir yang lahir di ranah Minangkabau banyak mendapat pengaruh tradisi dari tanah kelahirannya seperti norma, agama islam dan tradisi Minangkabau yakni rantau dan mufakat. Sutan Sjahrir yang lahir dari golongan bangsawan berhak mendapatkan pendidikan bergaya Belanda. Pendidikan Sutan Sjahrir di ELS, MULO, AMS dan Universitas Amsterdam. Sutan Sjahrir sejak sekolah ELS hingga AMS sudah dikenalkan pada budaya Eropa. Sutan Sjahrir mulai menyadari penjajahan mengakibatkan munculnya golongan tertindas dan penindas ketika sekolah di AMS Bandung. Berbagai kegiatan diikuti Sutan Sjahrir seperti memimpin Jong Indonesie, klub latihan debat *Patriae Scientiaeque*, tim sepakbola LUNO, klub teater Batovis dan ikut mendirikan *Volkuniversiteit* Tjahja. Selama di Bandung Sutan Sjahrir juga mulai mengadakan komunikasi dengan tokoh pemimpin pergerakan nasional. Sedangkan di Belanda Sutan Sjahrir dekat dengan tokoh SDAP yaitu Salomon Tas, aktif dalam Perhimpunan Indonesia, dan pernah bekerja untuk Serikat Buruh Transport Internasional. Sutan Sjahrir selama di Belanda mulai mengenal marxisme khususnya sosialisme sebagai ideologinya. Lingkungan politik yang mempengaruhi Sutan Sjahrir dimulai ketika bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, PNI baru. Selain bergabung dalam organisasi pergerakan Sutan Sjahrir pernah diasingkan ke Boven Digul dan Banda Neira. Pengalaman hidupnya bersama Hatta dalam Perhimpunan Indonesia maupun dalam pembuangan memberikan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat untuk mencapai demokrasi.

Kesimpulan kedua yaitu tentang wujud pemikiran Sutan Sjahrir tentang Demokrasi. Wujud demokrasi Sutan Sjahrir dalam penelitian ini adalah sosialisme kerakyatan, demokrasi dalam pandangan Sutan Sjahrir baik dalam bentuk demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Sosialisme kerakyatan adalah sosialisme demokratis yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Sosialisme kerakyatan merupakan ideologi yang anti-fasis, anti-imperialis, anti-feodal dan anti-komunis. Sosialisme kerakyatan mengakui kemerdekaan setiap orang untuk berpikir dan bertindak. Sosialisme kerakyatan juga memberikan arah perjuangan untuk mencapai demokrasi yakni melalui jalur parlementer dan berusaha mencapai masyarakat yang sosialis. Demokrasi politik Sutan Sjahrir berbentuk sistem pemerintahan parlementer yang sejalan dengan tujuan demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Melalui parlemen rakyat dapat memberikan suaranya dalam pemerintahan. Sehingga kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyat dan dari rakyat benar-benar terpenuhi. Demokrasi berarti Indonesia harus merdeka terlebih dahulu, barulah rakyat dapat benar-benar memiliki hak menentukan nasibnya sendiri. Tuntutan kemerdekaan sejalan dengan sosialisme kerakyatan Sutan Sjahrir. Demokrasi ekonomi Sutan Sjahrir berciri pertama, pembangunan merupakan urusan negara, masyarakat dan manusia, kedua, pentingnya ekonomi nasional dan kerjasama Internasional, dan ketiga, sifat masyarakat yang feodal dan boros perlu dirubah. Demokrasi sosial Sutan Sjahrir berciri merubah sifat dan jiwa feodal masyarakat kearah sifat dan jiwa nasional. Revolusi sosial merupakan jalan untuk mencapai demokrasi sosial. Pentingnya revolusi sosial merupakan keharusan masyarakat karena Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan. Sehingga perlu untuk membentuk jiwa dan sifat nasional bukan lagi feodal. Revolusi dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi revolusi nasional dan revolusi sosial. Revolusi nasional dan revolusi sosial adalah cara dalam mencapai demokrasi Indonesia.

Kesimpulan ketiga mengenai usaha Sutan Sjahrir memperjuangkan pemikirannya tentang demokrasi. Usaha tersebut diantaranya memimpin partai politik, memimpin BP-KNIP dan memimpin Kabinet pada masa memperjuangkan kemerdekaan. Partai politik yang dipimpin Sutan Sjahrir diantaranya PNI baru,

Partai Sosialis, dan Partai Sosialis Indonesia. PNI baru dan PSI adalah partai berbasis partai kader yang berusaha untuk meningkatkan kualitas anggotanya. Anggota yang memiliki kualitas dihapkan dapat meningkatkan kualitas rakyat banyak. Partai politik digunakan sebagai kendaraan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Wakil rakyat dari partai yang duduk di parlemen diharapkan dapat memberikan kebijakan yang berorientasi pada rakyat. Sehingga tujuan demokrasi dapat tercapai dan tercipta masyarakat sosialis.

Sutan Sjahrir memimpin BP-KNIP untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Sutan Sjahrir selama menjabat sebagai ketua BP-KNIP mengusulkan untuk mendirikan partai dan memberikan arah Indonesia ke jalan parlementer yang demokratis. Selain sesuai dengan wujud pemikiran demokrasi, Sutan Sjahrir juga berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh kedaulatan negara. Sutan Sjahrir melakukannya ketika menjabat sebagai Perdana Menteri Pertama di Indonesia. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Sutan Sjahrir melakukan kebijakan ke dalam dan keluar negeri. Ke dalam negeri Sutan Sjahrir berusaha memperbaiki kehidupan rakyat. Ke luar Sutan Sjahrir melakukan perjuangan diplomasi dan melakukan kerjasama Internasional untuk memperoleh pengakuan dari negara lain. Diplomasi pilih karena keadaan yang memaksa Sutan Sjahrir untuk melakukan negosiasi dengan Belanda. Belanda tidak ingin bernegosiasi dengan Soekarno karena dianggap sebagai penjahat perang. Demi kepentingan untuk mempertahankan kemerdekaan, diplomasi adalah cara memperoleh kedaulatan politik dari Belanda.

7.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memiliki saran. Adapun saran menurut penulis sebagai berikut :

1. bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan alternatif sumber belajar terutama sejarah indonesia dan sejarah pemikiran tokoh bangsa namun perlu dikembangkan lebih lanjut;
2. bagi penulis penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan pembaca diharapkan dapat menambah dan mengembangkan penelitian

mengenai Sejarah Indonesia, khususnya sejarah Indonesia dan Sejarah Intelektual;

3. bagi FKIP Universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. 2014. *Soekarno : Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta : Yayasan Bung Karno
- Agung, L. 2013. *Sejarah Intelektual*. Yogyakarta : Ombak
- Alfian, 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Abdurrahman, D.2007. *Metodologi Penelitian Sejarah* . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah*. Jakarta : Gramedia
- Anwar, R. 2010. *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Kompas Gramedika
- Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului zamannya*. Jakarta : Kompas
- Budiarjo, M. 1984. *Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi*. Jakarta : Gramedia
- Budiarjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT SUN
- Budiman, A. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta : Pustaka Utama
- Dahl, R. 2001. *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta : Yayasan Obor
- Daradjadi. 2014. *Mr. Sartono Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. Jakarta : Kompas
- Ebenstein, W.1994. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Jakarta : Erlangga
- Feith.H. Dan Castles L. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta : LP3ES
- Gaffar, A. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ingleson, J. 1983. *Jalan ke Pengasingan*. Jakarta : LP3ES
- Iskandar, M dkk. 1998. *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945-1950*. Jakarta : Eka Dharma

- Joeniarto. 1990. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kansil, C dan Kansil C. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kartodirjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia
- Koenjtaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI
- Legge, J.D. 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta : Temprint
- Leirissa, RZ. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia Tahun 1900-1950*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Malik, A. 1984. *Mengabdi Republik Jilid II*. Jakarta : Gunung Agung
- Mahfud, M. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta : Rineka
- Mangandaram, S. 1986. *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir*. Jakarta : Rosdajayaputra
- Martamin, M dkk. 1997. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta : CV Eka Dharma
- Mrazek, R. 1996. *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor
- Nasution, S. 1994. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Niel, R. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya
- Notosusanto, N dan Poesponegoro, M.D. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta : Balai Pustaka
- Poesprodjo, W. 1991. *Logika Scientifika. Pengantar Dialektika dan Ilmu*. Bandung: PT remaja Roesdakarya
- Pranoto, W.S. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Safwan, M dan Kutoyo S. 1980. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sagimun. 1989. *Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta : Bina Aksara

- Soebekti. 1966. *Sketsa Revolusi Indonesia 1940-1945*. Surabaya : GRIB
- Sjahrir, S. 1990. *Renungan dan Perjuangan*. Terjemahan oleh H.B.Jassin. Jakarta : Djambatan dan Dian Rakyat
- Sjahrir, S. 1945. *Perjuangan Kita*. Jakarta :Perjetakan Repoeblik Indonesia
- Sjahrir, S. 1947. *Pikiran dan Perdjuangan*. Jakarta : Poestaka Rakyat
- Sjahrir, S. 1982. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Jakarta : Leppenas
- Tidak Ada Penulis. 1951. *Kepartaian di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Penerangan
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Universitas Jember.

Skripsi dan Tesis

- Asyanto, O. 2012. “Peran Sjahrir dalam Politik Indonesia 1945-1949”. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember : Universitas Jember
- Badriah, Q. 2013. “Perbedaan Pemikiran Sutan Sjahrir dan Tan Malaka dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia”. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember : Universitas Jember
- Sari, D.W. 2008 . “Pemikiran Tan Malaka Tentang Kemerdekaan Indonesia”. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember
- Swastika, K. 2004. “Konflik Elit dan Perubahan Bentuk Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan”. Tidak Diterbitkan. *Tesis*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Romansyah, R. 2013. “Pemikiran Perjuangan Sutan Sjahrir dalam Mempertahankan Kemerdekaan 1945-1947”. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember : Universitas Jember
- Supriyadi, 2006. “Demokrasi dan Demokratisasi”. Tidak Diterbitkan. *Buku Ajar*. Jember : Universitas Jember

Majalah

- Pemimpin Redaksi. “Tiga Serangkai Ahli Waris Revolusi”. *Tempo*. 9-15 Maret 2009. Halaman 71.
- Pemimpin Redaksi. “Dilema Partai Kader”. *Historia*. No. 18 Tahun II. 2014. Halaman 42-45.

LAMPIRAN A.

MATRIKS PENELITIAN

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Intelektual	Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi Tahun 1926-1962	Penelitian Sejarah	Metode penelitian Sejarah dengan Langkah-langkah : Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi	Kajian Pustaka	<p>4. bagaimana kondisi sosial-budaya, pendidikan, dan politik yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi?</p> <p>5. bagaimana wujud pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi ?</p> <p>6. bagaimana Sutan Sjahrir memperjuangkan pemikiran demokrasi?</p>	<p>1. Buku</p> <p>2. Skripsi</p> <p>3. Majalah</p>

Lampiran C

KABINET SUTAN SJAHRIR I

1. Perdana Menteri : Sjahrir
2. Menteri Dalam Negeri : Sjahrir
3. Menteri Luar Negeri : Sjahrir
4. Menteri Penerangan : Amir Syarifuddin
5. Menteri Keamanan Rakyat : Amir Syarifuddin
6. Menteri Keuangan : Sunario Kulopaking
7. Menteri Pendidikan : T.G.S. Mulia
8. Menteri Kehakiman : Suwandi
9. Menteri Sosial : Adjidarmo
10. Menteri Kesehatan : Darmasetiawan
11. Menteri Perekonomian : Darmawan Mangunkusumo
12. Menteri Tenaga Kerja : Putuhena
13. Menteri Pekerjaan Umum : Putuhena
14. Menteri Perhubungan : Rasad

Lampiran D

Kabinet Sutan Sjahrir II

Perdana Menteri	: Sjahrir
Menteri Luar Negeri	: Sjahrir
Menteri Dalam Negeri	: Soedarsono
Menteri Kesehatan	: Darmawatiawan
Menteri Keuangan	: Surachman Tjokroadisurjo
Menteri Perdagangan Dan Industri	: Dermawan Mangunkusumo
Menteri Pertanian Dan Persediaan	: Rasad
Menteri Pertahanan	: Amir Sjaridudin
Menteri Kehakiman	: Soewandi
Menteri Pengajaran	: Moh. Syafei
Menteri Penerangan	: Mohammad Natsir
Menteri Sosial	: Mohammad Noer
Menteri Agama	: Moh. Rosjidi
Menteri Perhubungan	: Abdul Karim
Menteri Pekerjaan Umum	: Putuhera
Menteri Negara	: Wikana

Lampiran E

Kabinet Sutan Sjahrir III

Perdana menteri	: Sjahrir
Menteri luar negeri	: Sjahrir
Menteri dalam negeri	: Mohammad Roem
Menteri kesehatan	: Darmasetiawan
Menteri keuangan	: Sjafrudin Prawiranegara
Menteri perdagangan dan Industri	: Darmawan Mangunkusumo
Menteri pertanian dan persediaan	: Rasad
Menteri pertahanan	: Amir Syariffudin
Menteri kehakiman	: Mr. Susanto Tirtoproodjo
Menteri pengajaran	: Ir. Gunarso
Menteri penerangan	: Mohammad Natsir
Menteri sosial	: Maria Ulfa Santoso
Menteri agama	: Faturrachman
Menteri perhubungan	: Ir. Djuanda
Menteri pekerjaan umum	: Putuhena
Menteri negara	: Sri Sultan Hamengkubuwono IX cs

Lampiran F

NASKAH PERJANJIAN LINGGARJATI

(Penulisan disesuaikan dengan EYD)

Delegasi-delegasi Indonesia dan Belanda dalam rapat pada hari ini telah mendapatkan kata sepakat tentang persetujuan dibawah ini, hal mana terbukti dari pemaparan naskah tersebut dalam bahasa Belanda dan Indonesia masing-masing berlipat tiga.

Pemerintah Belanda,
dalam hal ini berwakilkan Komisi Jenderal
dan
Pemerintah Republik Indonesia,
dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia,

oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk bangunan baru, bagi kerjasama dengan sukarela, yang merupakan jaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh tegahnya kepada kedua bangsa itu di dalam masa datang, dan yang membukakan jalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan mupakat sebagai berikut, dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran daripada majelis-majelis perwakilan rakyat masing-masing.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja sama anantara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu supaya selambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan, dan dinamai Negara Indonesia Serikat

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan ketentuan bahwa, jika kaum penduduk dari pada sesuatu bagian daerah, setelah dimusyawatkan dengan lain-lain bagian daerah pun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk ke dalam perserikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu terhadap kerajaan Belanda.

Pasal 4

(1) Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo dan Timur Besar, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk dari pada sesuatu bagian daerah, untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain. (2) Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerahibunegerinya.

Pasal 5

(1) Undang-undang dasar dari pada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentukan negara, yang akan didirikan dari pada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingatkan ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.

(2) kedua belah pihak akan bermusyawarat tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentukan negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daera-daeraha yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleg golongan-golongan penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung jawab dari pada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela perliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri BBelanda dan Indonesia akan bekerjasama untuk membentuk persekutuan Belanda – Indonesia yang dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda, yang meliputi Negara Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao dan pada pihak lainnya dari pada Negara Indonesia Serikat. (2) Yang tersebut diatas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnya.

Pasal 7

(1) Untuk membela perliharakan kepentingan-kepentingan yang tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;

(2) Alat –alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negeri Indonesia Serikat; mungkin juga oleh majelis-majelis perwakilan negara –negara itu.

(3) Adapun yang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerja-bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan, seberapa perlu keuangan, serta juga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 8

Di pucuk Persekutuan Belanda-Indonesia itu duduk raja Belanda. Keputusan – keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh kelengkapan Persekutuan itu atas nama Bagian Raja.

Pasal 9

Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda dan kepentingan-kepentingan Kerajaan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Pasal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung ketentuan-ketentuan tentang : a). pertanggung jawaban hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewajiban-kewajiban yang satu kepada yang lain; b). hal kewarganegaraan untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia masing-masing di daerah lainnya; c). aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat itu tidak akan cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri; d). pertanggung jawaban dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, yang dimaksudkan juga oleh Piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

(1) Anggar-anggar itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.

(2) Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh majelis-majelis perwakilan rakyat kedua belah pihak masing-masingnya.

Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan agar supaya, setelah terbentuknya Persekutuan Belanda Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota didalam perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang dibekukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, yang lagi berada di dalam daerah kekuasaannya de facto. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan dan pengembalian itu.

Pasal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, akan supaya sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah persetujuan itu menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan balatenteranya masing-masing. Kedua Belah pihak akan bermusyawarat tentang sampai seberapa dan lambat cepatnya melakukan pengurangan itu; demikian juga tentang kerja-bersama dalam hal ketenteraan.

Pasal 17

(1) Untuk kerja bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri dari pada delegasi-delegasi yang ditunjukkan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnya, dengan sebuah sekretariat bersama;

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bila ada tumbuh perselisihan berhubungan dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, maka menyerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, yang diangkat dengan sepemupakat antara dua pihak delegasi itu, atau, jika tidak berhasil sepemupakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia.

Kedua-duanya naskah itu sama kekuatannya.

Jakarta, 15 Nopember 1946

Schermerhorn Sjahrir

Van Mook Roem

Van Poll Soesanto

De Boer Gani



Lampiran G




Gambar 1. Sutan Sjahrir

Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta : Kompas



Gambar 2. Sutan Sjahrir Ketika pulang ke Indonesia pada tahun 1932

Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta : Kompas



Gambar 3. Sutan Sjahrir bersama Poetra-Poetri Indonesia cabang Bandung
Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta : Kompas

Gambar 4. Sutan Sjahrir dalam pertemuan Perhimpunan Indonesia
Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta : Kompas



Gambar 5. Sutan Sjahrir bersama Soekarno dan Mohammad Hatta
Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului Zamannya*. Jakarta : Kompas

Gambar 6. Pelantikan Kabinet Sutan Sjahrir I di Pegangsaan Timur no 56
Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului Zamannya*. Jakarta : Kompas



Gambar 7. Pertemuan pertama delegasi Indonesia dan Belanda 17 November 1945

Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta : Kompas

Gambar 8. Penandatanganan Naskah Perjanjian Linggarjati

Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta : Kompas



Gambar 9. Sidang Kabinet Terakhir Sutan Sjahrir Jatuh
Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului Zamananya*. Jakarta : Kompas



Gambar 10. Sjahrir berpidato ketika kampanye dalam Pemilu 1955
Sumber : Anwar, R .2011. *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului Zamananya*. Jakarta : Kompas